



MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

EKOSISTEM RAMAH, RISET BERGAIRAH

Riset menjadi indikator kemajuan suatu bangsa . Melalui riset, ilmu pengetahuan dan teknologi kian berkembang. Sejumlah inovasi dan beragam solusi ditemukan. Pemerintah tengah berupaya merancang ekosistem yang ramah bagi riset. Demi Indonesia maju dan berdaya saing.



Daftar Isi



Ekosistem riset yang baik, mulai dari pendanaan, regulasi, koordinasi, termasuk lingkungan hulu terkait sistem pendidikan, akan mendukung perkembangan riset di Indonesia. Dukungan ekosistem yang baik ini kami gambarkan dengan sebuah wadah berisi tumbuhan, disertai media pendukung lainnya.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Suliastuti, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Ali Ridho, Budi Prayitno, Budi Sulistiyo. **Tim Redaksi:** Farida Rosadi, Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Agus Tri Hananto, Irfan Bayu **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadjii, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, Victorianus M.I. Bimo., **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

- 5 **DARI LAPANGAN BANTENG**
- 6 **EKSPOSUR**
- 10 **LINTAS PERISTIWA**
- 14 **TOPIK PILIHAN**
- 15 **TAGAR**

LAPORAN UTAMA

- 17 Bangkitkan Energi Riset Negeri
- 20 Infografis
- 22 Mendorong Penelitian Keberlanjutan
- 25 Tulang Punggung Kemajuan Bangsa
- 27 Mengungkit Gairah Riset Nasional

TRIVIA

- 29 Tahukah Kamu?

WAWANCARA

- 30 Kejar Ketertinggalan Pembangunan

FIGUR

- 34 Kejujuran dalam Meramu

OPINI

- 37 Evaluasi Tiga Tahun Masterplan AKSI

OPINI

- 40 Menilik Kesuksesan Malaysia dalam Pengelolaan Zakat

POTRET KANTOR

- 42 Wajah Kemajuan di Tanah Perbatasan

PROFESI

- 44 Juru Rembuk Kemaslahatan Rakyat

REGULASI

- 46 Batasan Harga Rumah Tanpa PPN Dinaikkan, Harga Lebih Terjangkau

GENERASI EMAS

- 48 Agar Pendar Impian Terus Menyala

BUGAR

- 51 Jangan Remehkan Sindroma Metabolik

RENUNGAN

- 52 Sebab Yang Mahal Itu Semangat

BUKU

- 53 Kata: Tentang Senja yang Kehilangan Langitnya

LOKAL

- 54 Natuna, Surga di Penghujung Utara

FINANSIAL

- 56 Dana Penyelamat Saat Darurat

NGOBROL BARENG KEMENKEU CORPU, PASTI SERU!

Cuma di Podcast **KEMENKEU CORPU LEARNING ON AIR (ECLAIR)** kalian bisa belajar keuangan negara dan berbagai hal kapan saja di mana saja. Sambil kerja atau santai, mengapa tidak?

Dengarkan Podcast Eclair Kemenkeu melalui:



Podcast
ECLAIR
 KEMENKEU CORPU LEARNING ON AIR

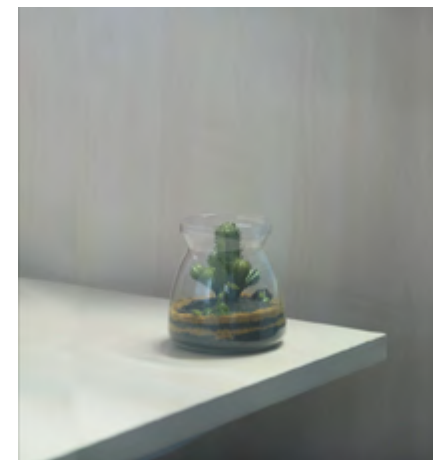
Dari Lapangan Banteng

Menuju Indonesia yang Berdaya Saing

Pemerintah sudah mencanangkan bahwa Indonesia harus dapat keluar dari *middle income trap* agar dapat menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Momentum yang bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka tersebut memberikan sebuah harapan bagi Indonesia yang selama ini masih dalam kelompok negara kelas menengah. Ada tiga unsur utama yang menunjang Indonesia agar dapat lebih produktif dan meningkatkan daya saing untuk mencapai tujuan tersebut. Tiga unsur utama tersebut adalah tenaga kerja, kapital, dan teknologi.

Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah mereka yang mampu meningkatkan kualitas diri baik dari segi kecerdasan, ketrampilan, maupun kesehatan. Sementara itu, dari sisi kapital dibutuhkan suatu infrastruktur yang memadai sehingga biaya investasi yang harus dikeluarkan bisa semakin murah agar dapat menghasilkan *output* yang tinggi. Dari sisi teknologi, dibutuhkan inovasi yang tepat guna agar dapat melakukan efisiensi yang memadai untuk meningkatkan hasil suatu produk.

Inovasi dapat dilakukan dengan adanya penelitian dan pengembangan yang untuk melaksanakannya membutuhkan dana. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan dana bagi kebutuhan riset.



Sebagai tahap awal, pemerintah telah mengalokasikan Dana Abadi Penelitian dalam APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp990 miliar. Kebijakan ini melengkapi komitmen pemerintah untuk menjadikan manusia Indonesia yang cerdas dan sehat dengan mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dan dana kesehatan sebesar 5 persen dari APBN.

Menyikapi penyediaan dana penelitian ini, tentu saja dibutuhkan suatu perangkat mekanisme yang tepat agar penggunaannya tidak sia-sia dan lebih terintegrasi. Pengalokasian dana ini juga dapat menjadi acuan bagi revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan. Salah satu klausul dalam revisi UU ini adalah payung

hukum untuk dana abadi penelitian.

Dana penelitian yang selama ini tersebar di setiap Kementerian/Lembaga akan lebih baik bila dapat digunakan secara teorkestrasi, tepat sasaran, dan tepat guna. Saat ini, selain Kementerian/Lembaga yang bergerak di bidang penelitian yang dikoordinasi oleh Kemristekditi, terdapat 45 Kementerian/Lembaga lain yang juga memiliki kegiatan penelitian. Beberapa diantaranya bahkan telah memiliki satuan kerja penelitian dan pengembangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan tata kelola yang baik agar dana riset dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusianya sendiri. Penelitian harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan mempunyai pengetahuan khusus di bidangnya masing-masing. Faktor sumber daya manusia menjadi kunci dalam kesuksesan pengelolaan riset yang terintegrasi dan komprehensif. Untuk itu, para ilmuwan yang selama ini belum memanfaatkan secara optimal dapat dikapitalisasi untuk dapat menghasilkan inovasi di berbagai bidang.

Nufransa Wira Sakti,
 Kepala Biro Komunikasi dan
 Layanan Informasi



JALAN LANCAR EKONOMI GENCAR

Gerbang tol Kalikangkung terletak pada akhir dari ruas jalan tol Batang - Semarang yang membentang sepanjang 75 kilometer. Jalan tol Batang - Semarang telah diresmikan pada akhir tahun 2018 dan merupakan bagian dari jalan tol trans Jawa yang menghubungkan Merak hingga Banyuwangi. Pemerintah berharap jalan tol yang memiliki nilai investasi sebesar Rp11,05 triliun ini dapat memberikan kemudahan akses logistik dan transportasi kepada masyarakat.

Foto
Arif kuswanadji



TIADA MATA TAK HILANG CAHAYA

Foto
Arief
Kuswanadji

Begitulah moto dari Yayasan Raudlatul Makfufin atau biasa disebut dengan Taman Tunanetra. Taman Tunanetra yang berlokasi di Kampung Jati, Tangerang Selatan ini menyediakan fasilitas berupa Alquran maupun buku keislaman yang dicetak dengan huruf braille. Para santri menyakini bahwa ketunanetraan tidak menghalangi mereka untuk menjalankan ibadah, termasuk membaca dan menghafal Alquran. Taman Tunanetra berharap para santrinya kelak menjadi tunanetra muslim yang berakhlak mulia, berintelektual tinggi, dan terampil dalam kemandirian.





08/06

Teks
Biro KLI

Foto
Asian Development Bank

Forum G20: Tantangan Perpajakan di Era Digital Sangat Besar

Era digital telah memengaruhi berbagai hal dalam kehidupan masyarakat termasuk perpajakan. Dalam forum sidang tahunan G20 yang dilaksanakan di Jepang (08/06), tantangan perpajakan di era digital menjadi salah satu topik seminar dengan pembicara Sekjen OECD dan beberapa Menteri Keuangan; Jepang, Perancis, Cina, Inggris, Amerika Serikat dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dengan 260 juta populasi dan 100 juta pengguna internet, realisasi penerimaan perpajakan masih belum tercermin dari besaran pengguna internet dan jumlah penduduk tersebut. Di era digital, salah satu aspek dalam perpajakan adalah tidak hanya berdasarkan *physical presence* atau kehadiran secara fisik dari para pengusaha yang melakukan kegiatan di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini prioritas tertinggi adalah melakukan redefinisi dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau *permanent establishment*.

Tantangan lain yang disampaikan Menteri Keuangan adalah bagaimana mengalokasikan hak pemajakan: formula dan dasar perhitungannya. Sekjen OECD Angel Guria menyampaikan bahwa G20 telah memberikan kontribusi signifikan dalam transformasi di

bidang perpajakan internasional: di bidang transparansi, pertukaran informasi, BEPS *standard*. Saat ini, 100 yurisdiksi telah sepakat untuk melakukan pertukaran informasi keuangan terkait perpajakan, dan telah menghasilkan pertukaran informasi sebanyak 47 juta transaksi dengan nilai 9 triliun euro.

Kemudian, di sela-sela pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dengan Menkeu Australia (Treasurer of Australia) Josh Frydenberg melakukan pertemuan bilateral antara kedua negara. Menkeu Sri Mulyani memaparkan bahwa Indonesia masih tetap fokus pada pembangunan infrastruktur baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Dari infrastruktur dan sektor lain, ia menggaris bawahi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 (Q1) yang mencapai 5,07 persen.

Menkeu menambahkan, untuk mencapai pertumbuhan di atas 5 persen perlu disiapkan berbagai insentif untuk asing. Dengan demikian, Indonesia dapat menyediakan berbagai insentif investasi dan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) misalnya dengan mengembangkan pendidikan vokasi.

27/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Wamenkeu Minta Pemda Kembangkan Pembiayaan Kreatif

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo dengan didampingi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Astera Primanto Bhakti mengikuti rapat kerja (Raker) bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ruang Rapat DPD, Senin (27/05). Wamenkeu mengingatkan pentingnya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk juga mengembangkan pembiayaan kreatif agar daerah dapat mengakselerasi pembangunan. “Saat ini, belum ada daerah yang memiliki obligasi daerah. Padahal ini bisa untuk akselerasi pembangunan agar tidak hanya mengandalkan APBD,” tegasnya. Untuk itu, Wamenkeu meminta dukungan dari para senator di DPD agar dapat mendorong Pemda menerbitkan obligasi daerah.



Lebaran, Menkeu Silaturahmi dengan Para Pemangku Kebijakan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengadakan *open house* Idulfitri 1440 H. Beberapa pemangku kebijakan dari berbagai kalangan antara lain Ketua DK OJK, Ketua DK LPS, Anggota DPR Melky dan Misbakhun, Mantan Menkeu Chatib Basri, Kepala SKK Migas, Kepala BKPM, Dubes Inggris, Kadin, Pejabat Eselon I Kemenkeu, organisasi masyarakat, dan kalangan media hadir sejak pagi. “Saya menggunakan momentum ini untuk silaturahmi dengan para partner, regulator, dari berbagai BUMN, staf saya sendiri, *stakeholder*, dan wartawan,” ungkap Menkeu di Widya Chandra, Jakarta pada Rabu (05/06). Pada kesempatan itu, ia menjelaskan dengan adanya momentum Lebaran diharapkan berbagai daerah mendapat tambahan peningkatan konsumsi dari para warga yang mudik ke kampung halamannya. Setelah bersilaturahmi, para pemudik akan memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan denyut perekonomian daerah.

28/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Pesan Sinergi Menkeu Bagi Jajaran Kemenkeu dan SMV

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi pesan penting kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan *Special Mission Vehicle* (SMV) Kemenkeu pada acara Peringatan Nuzulul Quran dan Buka Bersama di aula Djuanda, gedung Juanda I, Selasa (28/05). “Pemimpin jadilah perekat untuk hal-hal yang selama ini sudah retak, pemimpin jadilah pemersatu dari hal yang beberapa saat ini tercerai beraí,” tukas Menkeu pada sambutannya dalam acara yang bertema “Hadirkan Sinergi Membangun Negeri” ini. Menkeu juga berpesan agar para pemimpin tentu harus menjadi seseorang yang memberi solusi dari masalah bagi negeri ini. “Kita harus selalu berikhtiar. Ikhtiar yang penting adalah kita mampu membaca masalah, situasi, dan mencari solusi sehingga mampu menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang bisa menjadi harapan bagi seluruh bangsa dalam mencapai cita-cita,” jelasnya.





11/06

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Pemerintah Usulkan Angka-Angka KEM PPKF RAPBN 2020

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan pandangannya pada rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR mengenai pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2020 di ruang sidang Banggar DPR pada Selasa (11/06). “Kami akan menjaga rasio utang di kisaran 30 persen dengan *Primary Balance* yang sedikit positif dan tetap melakukan PMN untuk beberapa BUMN yang memang mendapatkan penugasan untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia. Kita akan terus bekerja sama dengan otoritas moneter dan regulator dan beberapa pembiayaan *below the line* maupun pembiayaan untuk mendukung ekspor tetap akan kita lakukan secara proporsional,” tambah Menkeu.

12/06

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



LKPP Raih Opini WTP Tiga Tahun Berturut-Turut

Pemerintah kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini merupakan capaian tiga tahun berturut-turut sejak 2016. Dalam pidato sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan rasa syukur dan bangganya atas capaian tersebut. Hal ini disampaikan Menkeu pada acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 pada bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional di Auditorium BPK, Jakarta, Rabu (12/06). “Pada tahun 2018 yang penuh tantangan perekonomian global kita patut bersyukur bahwa pelaksanaan APBN 2018 telah ditutup dengan cara yang sangat baik, termasuk dari sisi belanja negara yang telah menunjukkan kinerja yang terkendali dan sesuai prioritas nasional bahkan dari sisi eksekusi melampaui batas ekspektasi,” tegas Menkeu menyatakan kebanggaannya atas capaian kinerja APBN 2018.

14/06

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Pelantikan Eselon II dan III, Menkeu: Jajaran Kemenkeu Harus Jaga Persatuan dan Kesatuan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan agar seluruh jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu menjaga kesatuan dan persatuan, menghargai perbedaan dan membangun iklim yang sejuk, baik di dalam lingkungan Kemenkeu maupun kepada pihak luar. “Kementerian Keuangan adalah institusi yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk terus menjaga jahitan kesatuan Republik Indonesia,” tegas Menkeu untuk seluruh jajaran Kemenkeu pada umumnya dan khususnya 499 pejabat eselon II dan III di lingkungan Kemenkeu yang baru dilantik di Gedung Dhanapala, kompleks Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/06). 499 pejabat yang dilantik terdiri dari 22 Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), serta 477 Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), DJP, DJBC, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), DJKN, dan DJPPR.



14/06

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu: SMV Harus Memaksimalkan Manfaatnya

Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, Menkeu berkunjung ke kantor salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), sekaligus melakukan pertemuan rutin dengan Direktur Utama SMV Kemenkeu. Pada kesempatan itu, Menkeu berpesan agar SMV sebagai bagian dari instrumen keuangan negara harus mampu memaksimalkan manfaatnya. “Saya minta kepada pimpinan SMV dan Kemenkeu untuk bersama-sama bekerja keras. Hingga nanti ketika pensiun melihat ke belakang, bisa mengatakan: *I did my best and that best is good enough*. Bukan *my best but not good enough*. Wujudkan kerja sama dan kerja keras melalui sinergi yang ambisius. Jadikan setiap menit dari setiap pertemuan menjadi pertemuan yang memiliki manfaat besar untuk negara,” pungkas Menkeu di Graha SMF, Jumat (14/06). Kementerian Keuangan beserta SMV memiliki skala tugas yang besar untuk mencapai tujuan negara. Untuk itu, Menkeu mengingatkan agar setiap SMV dapat menjadi institusi yang mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi.

18/06

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Pagu Indikatif Kemenkeu Tahun 2020 Diajukan Di Kisaran Rp44 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaksanakan Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kemenkeu dan Pagu Indikatif RAPBN 2020 di Ruang Rapat Kerja Komisi XI, Selasa (18/06). Untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, Kemenkeu mendukung 12 proyek nasional senilai Rp509,84 miliar serta 51 proyek unggulan untuk mencapai sasaran strategis Kemenkeu senilai Rp319,08 miliar. Oleh karena itu, pagu indikatif yang diajukan oleh Kemenkeu total sebesar Rp44,39 triliun. Ia menjelaskan, selama lima tahun terakhir akuntabilitas kinerja Kemenkeu antara lain peningkatan penerimaan perpajakan dari 2015-2018 sebesar Rp278,5 Triliun, peningkatan tren waktu *custom clearance* dari 1,2 hari menjadi 0,57 hari, dan kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah semakin kecil. “Terima kasih atas pembahasan yang sangat produktif dan konstruktif terhadap pagu indikatif anggaran Kemenkeu. Kami berjanji akan terus melakukan optimalisasi dari efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional,” ucap Menkeu di akhir rapat.



LKPP Hattrick WTP

Teks Abdul Aziz

Akhir bulan Mei, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan opini *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. WTP ini menjadi opini terbaik ketiga kalinya yang diberikan oleh BPK kepada LKPP. Meski predikat tertinggi WTP diberikan pada laporan keuangan tersebut, pemerintah tidak bisa berpuas diri. Topik yang dibangun di masyarakat pun muncul dengan berbagai perspektif.

Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, menjelaskan bahwa LKPP menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2018. Laporan keuangan tersebut secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan. Hal senada juga diungkapkan Ketua DPD RI, Oesman Sapta, yang menyampaikan

apresiasi atas kerja sama antara BPK RI dan DPD RI. Menurutnya, DPD RI akan fokus melakukan pengawasan terhadap alokasi dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Ia juga mengapresiasi atas capaian WTP LKPP Tahun 2018.

Menanggapi beberapa temuan BPK, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan temuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terkait dengan penjualan produk baja di Pulau Batam. Untuk itu, Ditjen Bea dan Cukai bersama dengan Kemenko Perekonomian sedang melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan rekomendasi BPK. Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal akan dibenahi agar laporan keuangan lebih akuntabel, berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat. Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan,

menjelaskan temuan masalah piutang pajak disebabkan belum terintegrasinya sistem pencatatan piutang pajak sehingga rekapitulasi kurang akurat. Namun demikian, Robert mengungkapkan sudah banyak kemajuan dalam tata kelola pencatatan piutang pajak selama ini.

Menkeu juga menyampaikan opini WTP atas LKPP Tahun 2018 merupakan capaian yang baik dan harus dipertahankan. Terlebih prestasi tersebut telah berhasil dipertahankan selama tiga tahun berturut-turut. Menkeu menekankan hasil temuan BPK akan menjadi dorongan tersendiri bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja laporan keuangan sehingga opini WTP tersebut bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Foto
Biro KLI

positif dari negara anggota yang hadir. Sementara itu, kebijakan fiskal yang ekspansif dalam RAPBN 2020 beserta kerangka ekonomi makronya juga menjadi topik hangat. Beberapa fokus utama dalam pembahasan adalah strategi pengendalian inflasi, produktivitas, SDM, pemerataan dan *middle income trap*. Tak hanya itu, dampak perang dagang AS-Cina juga turut mewarnai opini masyarakat.

Setiap bulan Media Keuangan mengajak partisipasi pembaca untuk memberikan opini lewat kuis di kanal instagram @majalahmediakeuangan dan twitter @kemenkeuri. Opini yang diberikan menanggapi topik-topik hangat pilihan redaksi.

-  www.kemenkeu.go.id
-  KemenkeuRI
-  @KemenkeuRI
-  KemenkeuRI
-  KemenkeuRI
-  majalahmediakeuangan



@majalahmediakeuangan Sampaikan secara singkat opini konstruktif Anda terkait pengelolaan keuangan negara hingga saat ini



Like

Reply



@sivaristantiya Semoga ke depannya, pelaksanaan penggunaan dan tata kelola keuangan negara terus terjaga. Sehingga, laporan keuangan tidak hanya menunjukkan akuntabilitas yang baik dan transparansi tinggi, namun juga berdampak langsung bagi masyarakat agar pemerintah mampu mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.



@nununagagstna Opini WTP oleh BPK terhadap LKPP menunjukkan laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Serta membuktikan bahwa APBN dikelola dengan prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban dan untuk kesejahteraan rakyat.



@johanalanjar Menjadi tantangan bagi pemerintah, agar entitas yang telah WTP dapat mempertahankannya. Sementara, yang WDP atau TMP dapat naik kelas menjadi WTP.

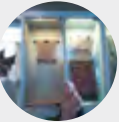


@KemenkeuRI Sampaikan #OpiniAnda terkait #DanaAbadiPenelitian sebagai langkah peningkatan kualitas SDM Indonesia berkualitas dan berdaya saing tinggi.



Like

Reply



@wjl97 patut diapresiasi, karena hal tersebut jelas menjadi suatu investasi berkesinambungan untuk peningkatan kualitas SDM indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi khusus.a di revolusi industri 4.0 ini



@smti23 saya mengapresiasi bagaimana Pemerintah berkomitmen dalam perbaikan kualitas SDM. Sebaik-baik investasi ialah dari SDM negara itu sendiri. Dari situ tentu akan menghasilkan output bagus untuk kemaslahatan semua.



@NovitaArumdita penelelitian dan pelatihan skill SDM daerah pedalaman & perbatasan harus didahulukan supaya bisa lebih beradaptasi dengan lingkup ekonomi global



Pengembangan IPTEK menjadi jalan guna meningkatkan daya saing negara

Foto Resha Aditya

BANGKITKAN ENERGI RISET NEGERI

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tidak pernah ingkar janji dalam memberikan manfaat dan kebaikan. Begitupun keandalannya dalam menghasilkan solusi atas sejumlah permasalahan negeri. Bidang industri, ekonomi, pariwisata, hingga budaya, membutuhkan IPTEK agar bisa maju dan berkembang. Sejarah pun membuktikan, negara-negara besar hari ini adalah mereka yang tingkat penguasaannya terhadap IPTEK, begitu tinggi.

Pada sisi lain, kemajuan IPTEK berkaitan erat dengan kegiatan riset. Semakin subur kegiatan riset suatu negara, maka semakin maju penguasaan IPTEK di negara tersebut. Selain itu, semakin banyak pula inovasi dan solusi yang bisa ditemukan. Maka, untuk menjadi negara maju, ekosistem yang kondusif dalam mendukung kegiatan riset, mutlak diperlukan.

Negara potensial

Indonesia tengah menyambut momentum menuju negara berpenghasilan tinggi pada 2045 mendatang. Untuk merealisasikan hal tersebut, Indonesia perlu meningkatkan daya saingnya terhadap negara lain. Salah satunya, melalui pengembangan IPTEK. Sejalan dengan itu, visi riset nasional pada 2017-2045 mencanangkan terwujudnya Indonesia Berdaya Saing dan Berdaulat berbasis IPTEK.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, memiliki potensi dan kapasitas untuk menciptakan momentum pembangunan yang kuat. “(Untuk itu), kebijakan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan sumber daya manusia, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, termasuk riset dan teknologi, menjadi bagian yang komprehensif dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Indonesia,” tuturnya.

Menyoroti anggaran riset

Pemerintah menyadari kebutuhan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dalam hal penguasaan IPTEK. Itu sebabnya, 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk pendidikan. Diketahui pada APBN 2019, anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah mencapai tidak kurang dari Rp492,5 triliun. Kepada Media Keuangan, Menkeu mengungkapkan porsi anggaran penelitian masuk ke dalam anggaran pendidikan.

“Kalau dari sisi *above the line*, anggaran penelitian 2019 mencapai Rp35,7 triliun. (Jumlah ini) meningkat dari tahun sebelumnya, sebesar Rp33,8 triliun pada 2018 dan sebesar Rp24,9 triliun pada 2016,” sebutnya. Selanjutnya pada 2019, untuk pertama kalinya, pemerintah mengalokasikan dana abadi riset sekitar Rp1 triliun. Dana abadi riset ini menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam mengatasi keterbatasan anggaran riset.

Sebagaimana diketahui, kontribusi anggaran riset Indonesia masih didominasi oleh pemerintah. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti

Muhammad Dimiyati mengungkapkan, sebanyak 86 persen anggaran riset disuplai oleh pemerintah. “Sementara sisanya sebesar 14 persen berasal dari swasta,”terangnya. Kondisi ini berkebalikan dengan negara maju. Sebab kontribusi swasta mendominasi porsi anggaran riset negaranya.

Akuntabilitas jadi utama

Keterbatasan anggaran yang dimiliki negara tak pelak menuntut penggunaan anggaran yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk juga yang berkaitan dengan dana riset. Tidak dapat dipungkiri, pemanfaatan dana riset selama ini terfragmentasi karena tersebar di 52 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Selain terfragmentasi, penggunaan anggaran riset yang betul-betul didedikasikan untuk kegiatan riset semakin terbatas.

Menkeu menyoroti pentingnya pemanfaatan dana riset secara optimal. “Jika (dana riset) dikelola oleh K/L yang *mindset*-nya hanya birokratis dan bukan dalam rangka menyelesaikan masalah atau meng-*address* suatu isu, maka anggaran (riset) yang besar tidak mencerminkan kemampuan dan kualitas untuk bisa menghasilkan riset,” sebutnya.

Menkeu berpesan agar jangan sampai anggaran riset yang dialokasikan selama ini, justru habis untuk administratif atau belanja perjalanan dinas. “Karena kita juga tahu penyakit dari anggaran secara umum,” ungkapnya.

Saat ini, anggaran riset Indonesia (*Gerd of Research and Development*, GERD) baru mencapai 0,25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Diakui Menkeu, pemerintah terus mengupayakan yang terbaik guna meningkatkan anggaran riset menuju jumlah idealnya. Salah satunya melalui dana abadi riset.

Namun Menkeu juga menekankan, alokasi anggaran tidak terlepas dari bagaimana anggaran tersebut digunakan. “Diharapkan riset ini bisa diukur, baik

dari sisi hasilnya, sisi temanya yang memang merupakan prioritas, serta dari sisi akuntabilitas kepada masyarakat,” tegasnya.

Ungkit sumber daya

Senada dengan hal ini, Muhammad Dimiyati membeberkan sejumlah persoalan yang berhasil dipetakan Kemenristekdikti terkait perkembangan riset. Selain persoalan anggaran dan pengelolaannya, terdapat beberapa tantangan yang menjadi catatan.

“Pertama, masalah sumber daya, baik manusianya, maupun perangkat infrastruktur penelitiannya,” sebut Dimiyati. Dari sisi SDM, jumlah peneliti Indonesia tidak sebanyak yang dimiliki negara-negara maju. “Dari 1 juta penduduk, kita baru punya 1.071 peneliti. Sementara Korea, misalnya, sudah mempunyai 8.000 peneliti per 1 juta penduduk,” rincinya.

Terkait minimnya jumlah peneliti, Menkeu menggarisbawahi pentingnya upaya menumbuhkembangkan budaya meneliti sejak dini. Salah satunya, melalui sistem pendidikan yang mampu menciptakan hubungan belajar mengajar yang tidak hanya bersifat doktrinasi menghafal, tetapi juga memberi kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi dan berpikir kreatif. Bagi Menkeu, peran lembaga pendidikan dalam membangun generasi yang gemar meneliti begitu krusial.

“Karena (lembaga pendidikan) akan menjadi semacam *breeding ground* atau tempat awal untuk persemaian dari anak-anak kita, generasi kita, sehingga muncul kelompok intelektual yang memiliki keingintahuan terhadap suatu isu atau masalah. Kemudian (mereka) menerjemahkannya ke dalam bentuk penelitian-penelitian yang sifatnya sistematis, ilmiah, serta bisa menghasilkan solusi dan bisa dipertanggungjawabkan,” Menkeu menjelaskan.

Selanjutnya, dari sisi sumber daya penelitian, Dimiyati menyebutkan tidak sedikit perangkat yang dimiliki Indonesia

berupa alat-alat laboratorium telah usang, bahkan tidak tersedia. “Misalnya, mau mengukur sesuatu yang sifatnya sangat kecil, di Indonesia tuh *nggak* ada perangkat itu. Kita harus ke luar negeri. Kalaupun ada, itu sudah tertinggal,” katanya.

Tak sesuai kebutuhan

Dimiyati juga menyoroti banyaknya hasil penelitian yang tidak sejalan dengan kebutuhan industri. “(Akibatnya), hasil penelitian tidak pernah bisa dihilirkan menjadi produk yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” sesalnya.

Lebih jauh Dimiyati mengungkapkan, dari sekian banyak institusi yang melakukan riset, tidak jarang riset yang dihasilkan saling bertumpang tindih. “(Bahkan), kadang-kadang riset itu betul-betul *copy paste* dengan riset yang diadakan di litbang K/L. Jadi tidak satu *framework*,” ungkapnya.

Tantangan lain berkaitan dengan riset adalah masih banyaknya hasil riset yang tidak relevan untuk memecahkan masalah yang dibutuhkan masyarakat. “Jadi riset dilakukan sebatas pada kebutuhan periset itu sendiri, baik untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Bukan untuk memajukan daya saing, apalagi memecahkan permasalahan bangsa,” kata Dimiyati menyesalkan.

RIRN jadi solusi

Guna menjawab beragam tantangan riset tersebut, pemerintah telah menyusun Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) periode 2017-2045. Hal ini diundangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018. RIRN sengaja disusun guna mendorong kemajuan IPTEK, serta meningkatkan kontribusi riset bagi perekonomian nasional.

“(RIRN) Ini diharapkan akan menjadi panduan bagi para peneliti dan seluruh komunitas peneliti di negara ini untuk menuju pada tahapan-tahapan tertentu pada waktu tertentu mengenai (arah) riset itu akan dibawa ke mana,” ungkap Dimiyati.

Lebih jauh dia melanjutkan, RIRN



Semakin subur kegiatan riset suatu negara, semakin banyak pula inovasi dan solusi yang bisa ditemukan.

Foto
Anas Nur Huda

mengatur secara rinci bidang fokus riset maupun prioritas riset ke depan. Selanjutnya, prioritas riset nasional akan dirumuskan setiap lima tahunan sekali. “*Nah*, untuk bisa mencapai ini semua, kita perlu berbagai instrumen, regulasi, termasuk anggarannya. Ini yang sedang menjadi topik pembahasan pemerintah saat ini (bersama DPR). Dari berbagai instrumen itu, nanti akan kita dorong, termasuk reformasi kelembagaannya, sehingga bisa fokus dan sangat *valid*,” katanya menjelaskan.

Terdapat beberapa target indikator yang ingin diraih Indonesia melalui penyusunan dan implementasi RIRN 2017-2045. Pertama, dari sisi rasio anggaran riset. Kontribusi swasta terhadap belanja riset diharapkan bisa

mendekati 75 persen, sedangkan pemerintah baik pusat dan daerah di kisaran 25 persen. Selanjutnya, RIRN juga menargetkan total belanja riset Indonesia bisa mencapai 1,68 persen dari PDB pada 2025 mendatang.

Kedua, dari sisi SDM. RIRN mematok target rasio kandidat SDM IPTEK terhadap jumlah penduduk Indonesia. Pada 2025 diharapkan terdapat 3.200 orang per 1 juta penduduk, serta 8.600 orang per 1 juta penduduk pada 2045. RIRN menyebutkan, kecukupan jumlah SDM ini perlu dipenuhi agar kontribusi riset bisa berperan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka berpotensi menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK di masa depan.

Ketiga, terkait produktivitas periset. Pada 2025 pemerintah menargetkan

dari setiap 100 periset, terdapat sedikitnya 8 publikasi internasional bereputasi, serta 22 publikasi internasional bereputasi per 100 periset pada 2045.

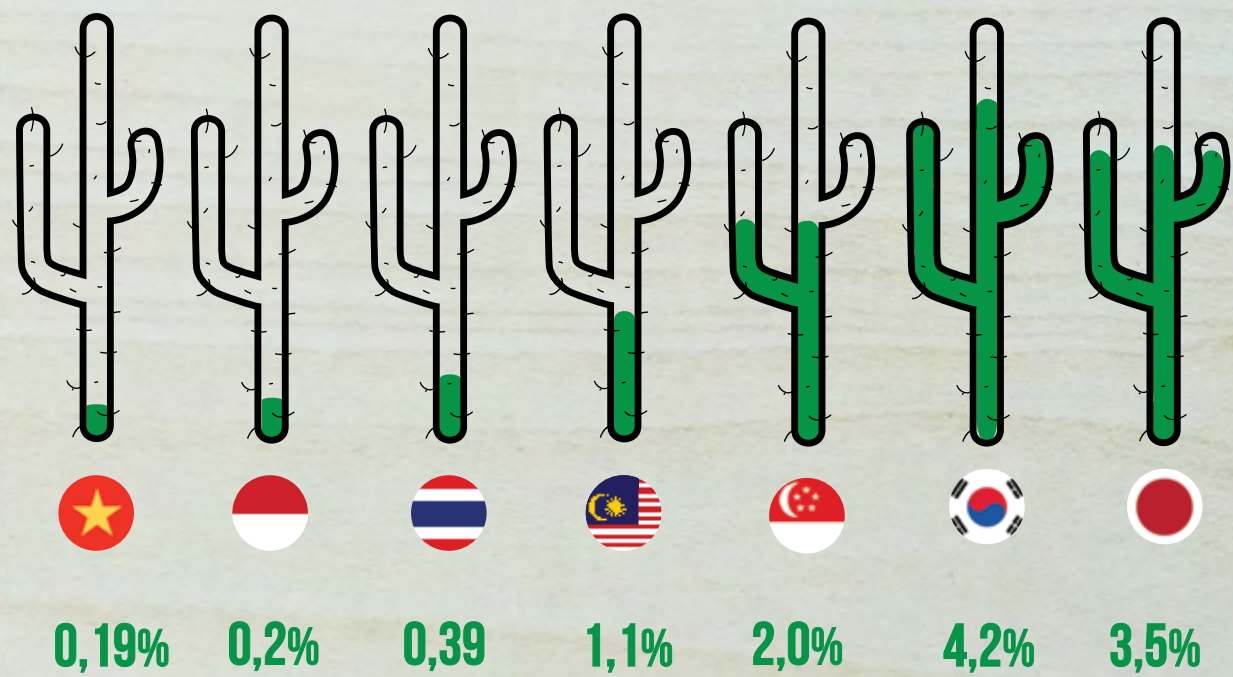
Untuk mencapai itu semua, pemerintah perlu membangun ekosistem yang ramah bagi kegiatan riset. Selain terkait kelembagaan riset, pemerintah menjalankan sejumlah strategi guna menumbuhsuburkan riset, diantaranya melalui peningkatan kerjasama riset dengan industri, pemberlakuan pengurangan pajak terhadap perusahaan yang bersedia mengalokasikan anggarannya, serta pemberian insentif bagi industri yang melakukan hilirisasi produk-produk hasil riset. Selain itu, guna memunculkan tunas periset baru, pemerintah mendorong peneliti muda di bangku sekolah untuk terlibat dalam banyak kegiatan penelitian. Dimiyati juga menuturkan, pemerintah tengah menyiapkan program sertifikasi bagi masyarakat peneliti, yang bukan dari lembaga penelitian, untuk dapat disetarakan.

Teks Farida Rosadi

ANGGARAN RISET

Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi guna mendorong pengembangan penelitian termasuk alokasi pendanaannya. Hal ini dikarenakan Indonesia menyadari bahwa untuk bisa menjadi suatu negara yang bisa menjaga momentum pembangunannya secara kuat, peranan dari teknologi dan riset menjadi sangat penting.

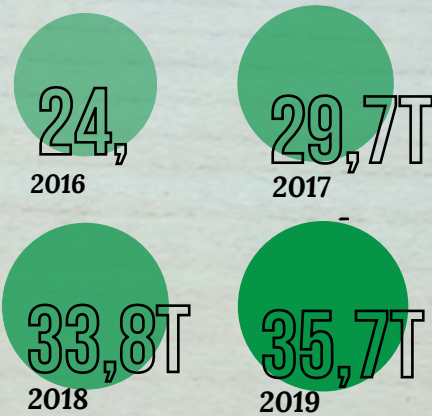
POSISI INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA LAIN DALAM HAL PENGANGGARAN RISET



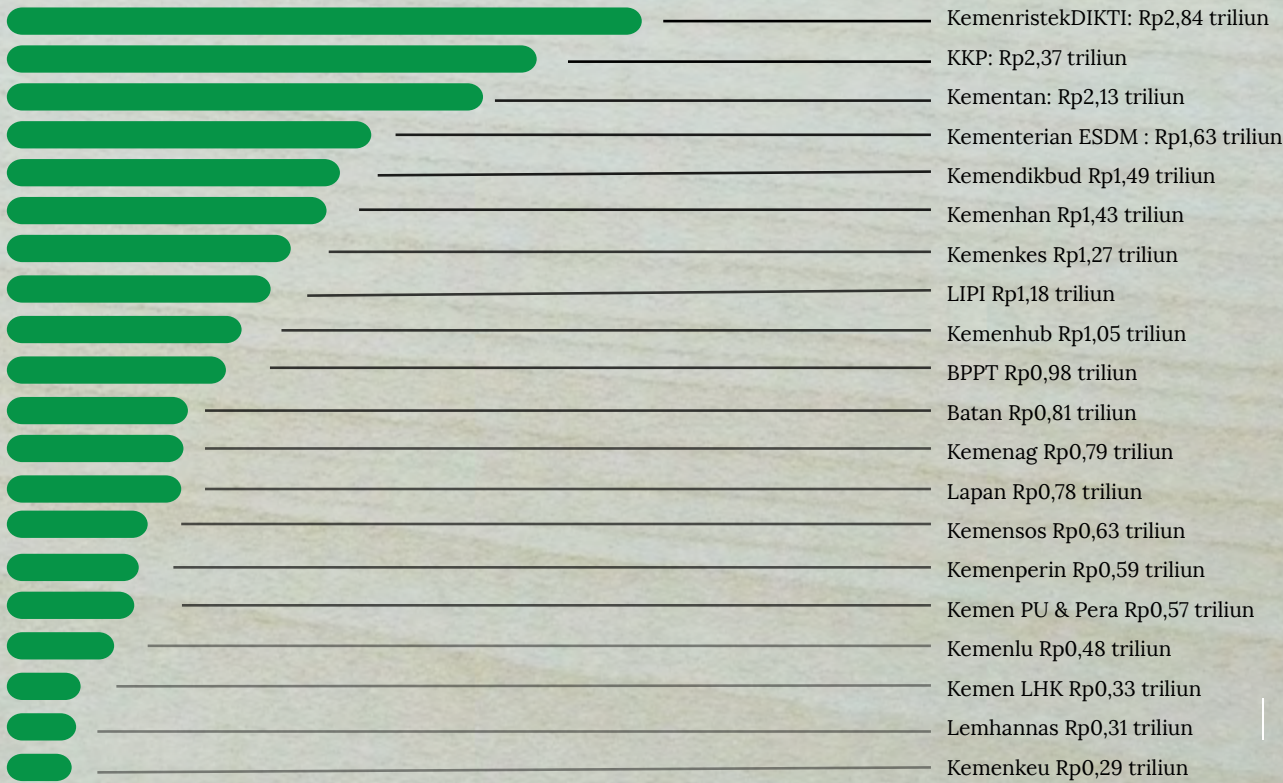
RINCIAN ALOKASI BELANJA LITBANG/GBAORD PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016

- Litbang (Kegiatan yang dilakukan institusi Litbang) : 43,74 persen atau Rp10,90 triliun
- Jasa IPTEK (pelayanan informasi Iptek, pengumpulan data – ekspedisi, identifikasi spesies, konservasi, pengujian & standarisasi, *patent & licence work*, diseminasi: 13,17 persen atau Rp3,28 triliun
- Pendidikan Pelatihan (*workshop* metodologi, pelatihan pengambilan sampel dll.) : 5,77 persen atau Rp1,44 triliun Belanja Operasional (gaji pegawai, operasional Litbang): 30,68 persen atau Rp7,65 triliun
- Modal (gedung laboratorium litbang): 6,65 persen atau Rp1,66 triliun

ALOKASI ANGGARAN RISET DI INDONESIA DARI TAHUN KE TAHUN



SEBARAN ALOKASI BELANJA LITBANG (GBAORD) KEMENTERIAN DAN LPNK (TOP 20) TAHUN 2016



MENDORONG PENELITIAN KEBERLANJUTAN



Dari satu juta penduduk Indonesia, 1.071 diantaranya adalah peneliti

Foto
Resha Aditya

Seorang peneliti menerawang di sepanjang pinggir Danau Maninjau Kabupaten Agam Sumatera Barat. Ia sedang memikirkan solusi untuk menjernihkan kembali air danau yang tercemar. Pada tahun 2011 Kementerian

Lingkungan Hidup menempatkan Danau Maninjau sebagai salah satu dari lima belas danau prioritas di Indonesia yang sangat penting untuk diselamatkan. Data LIPI mengungkapkan fungsi strategis Danau Maninjau sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air kapasitas daya

64 MW dengan nilai ekonomi Rp71,8 milyar per tahun, pariwisata Rp2,15 milyar per tahun, perikanan tangkap Rp1,12 milyar per tahun pada 2009 dan usaha perikanan keramba jaring apung (KJA) sebesar Rp112 milyar pada tahun 2003. Nilai ekonomis yang besar tersebut tak akan lagi didapat bila pencemaran air terus berlanjut.

Beberapa bulan kemudian, ia dan kawan-kawannya pun berhasil menemukan formula model pengendalian daya rusak air untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan Danau Maninjau. Alhasil, dampak dari model itu pun kini perlahan mulai terasa. Bahkan, model pengelolaan tersebut berhasil dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2017 tentang Budidaya Ikan pada Keramba Jaring Apung Ramah Lingkungan. Kisah tersebut merupakan satu dari banyak cerita keberhasilan penelitian yang berdampak pada masyarakat yang dibiayai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa pengelolaan anggaran riset saat ini tersebar di Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlihat dari data sebanyak 52 K/L terdiri dari 7 K/L rumpun Riset dan Teknologi (Ristek) dan 45 K/L yang merupakan rumpun non-Ristek. Namun demikian, nilai anggaran riset selalu meningkat dari tahun ke tahun.

“Jadi dalam hal ini, Kementerian/Lembaga melakukan

riset dengan jumlah anggarannya, tahun 2018 sebesar Rp33,8 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp35,7 triliun. Ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp24,9 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp29,7 triliun,” jelas Menkeu saat melakukan wawancara dengan Media Keuangan.

Dana abadi penelitian

Terkait upaya menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam mengembangkan riset nasional, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Dit. PMK), Purwanto, menjelaskan dari aspek regulasi, pengembangan penelitian didukung dengan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045.

Dalam kedua regulasi tersebut, Kementerian Ristek dan Dikti diberikan tanggung jawab mengkonsolidasi strategi, kebijakan, dan pelaksanaan pengembangan penelitian di Indonesia. Pada Perpres di atas, secara khusus ditetapkan bidang penelitian yang menjadi prirotas utama untuk dikembangkan dalam rangka kemandirian dan peningkatan kapasitas nasional, yaitu bidang pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, dan bidang riset lainnya.

Dari aspek kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, pengembangan penelitian juga merupakan salah satu prioritas pemerintah.

Lebih jauh, sebagai upaya mendukung kebijakan strategis, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengalokasikan Dana Abadi Penelitian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 2019. Hal itu juga menjadi bentuk antisipasi terhadap proses revisi RUU perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2002.

“Di dalam RUU revisi UU 18 tahun 2002 tersebut ada klausul yang akan memayungi adanya Dana Abadi Penelitian. Alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR untuk memajukan bidang penelitian,” jelasnya.

Senada dengan Purwanto, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN), Rofyanto Kurniawan, mengungkapkan menurut data yang dirilis Bank Dunia di tahun 2018, tingkat indeks sumber daya manusia Indonesia saat ini berada pada angka 0,53 atau menempati peringkat ke 87 dari 157 negara. Indeks ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas SDM baik melalui pendidikan maupun kesehatan, guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut, berdasarkan data yang dirilis oleh Global R&D Funding Forecast pada akhir tahun 2018, rasio belanja kegiatan R&D di Indonesia di tahun 2017 sekitar 0,3 persen dari PDB Indonesia. Angka ini relatif jauh di bawah negara-negara seperti Korea Selatan (4,3 persen), Jepang (3,5 persen), Taiwan (2,45 persen), Singapura (2,62 persen), ataupun Malaysia (1,27 persen). Sementara itu, kegiatan riset di suatu negara memiliki peran yang penting untuk meningkatkan daya saing suatu negara, terlebih lagi di era revolusi industri 4.0 di saat ini.

Melihat kondisi tersebut, Rofyanto mengatakan pemerintah saat ini tengah berfokus pada pengembangan penelitian di Indonesia. Hal tersebut tercermin pada besaran anggaran untuk penelitian berupa dana abadi penelitian yang tercantum pada APBN 2019 sebesar Rp990 miliar sebagai upaya pemerintah untuk mendukung riset di tanah air.

Pembiayaan riset

Lebih jauh, Rofyanto menjelaskan bahwa dana abadi merupakan sarana investasi yang berkesinambungan. Hasil investasinya dapat digunakan untuk tujuan nirlaba seperti beasiswa pendidikan, biaya riset, dan lainnya. Menurutnya, model pengelolaan dana abadi penelitian dapat berkaca pada pengelolaan dana LPDP. Ia berharap dalam jangka waktu lima tahun ke depan, dana abadi penelitian bisa berkembang hingga Rp50 triliun guna pengembangan riset di Indonesia. Skema pendanaan melalui dana abadi seperti ini bisa menjadi jawaban Pemerintah atas ketersediaan dana penelitian yang selama ini dianggap masih tampak kecil.

“Dalam penciptaan kondisi *Research and Development* yang kondusif, tugas pemerintah adalah bagaimana melakukan penguatan sistem inovasi antara lain dengan mengeluarkan kebijakan yang menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi dan bisnis,” jelasnya.

Pelaksana Tugas Direktur Fasilitas Riset dan Rehabilitasi LPDP, Zanaria, mengungkapkan bahwa awal berdirinya program LPDP untuk membiayai riset dimulai pada tahun 2013. Untuk prioritas riset sendiri, LPDP lebih mengutamakan kepada riset-riset yang sifatnya di hilir karena menurutnya pihak yang melakukan pendanaan terhadap riset dasar dan riset terapan sudah cukup banyak.

Untuk meningkatkan *resources* dan kualitas output penelitian nasional, LPDP memberikan dukungan alternatif pembiayaan melalui beberapa program. Pertama, program RISPRO Kompetisi yang diharapkan dapat meningkatkan

kekayaan intelektual dan produk inovasi nasional. Yang kedua adalah Rispro Invitasi dan RISPRO Kolaborasi Internasional yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah sekaligus kualitas publikasi nasional dan merupakan program ‘*nurturing*’ ke arah RISPRO Kompetisi, terutama di bidang-bidang riset strategis seperti transportasi, kesehatan dan obat, serta TIK dalam rangka menuju Indonesia 4.0.

Lebih jauh, Zanaria mengungkapkan dari tahun 2013 hingga Maret 2019, LPDP telah mengeluarkan nilai kontrak pembiayaan RISPRO sebesar Rp267,65 miliar. Angka tersebut terdiri dari pendanaan RISPRO Kompetisi sebanyak 104 judul riset dengan nilai sebesar Rp122,63 miliar, RISPRO Invitasi sebanyak 10 judul riset dengan nilai sebesar Rp122,08 miliar, dan RISPRO Kolaborasi Internasional sebanyak 11 judul riset dengan nilai sebesar Rp22,92 miliar.

Ia juga menjelaskan bahwa LPDP saat ini memiliki model pengembangan dana yang sudah baik. Kedepannya, ia berharap ada penentuan riset prioritas yang perlu disinergikan dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Hal ini akan mendukung pula terkait pengelolaan dana abadi penelitian.

“Kalau sudah ada dana abadi ini, ada kepastian bahwa dana riset itu akan bergulir secara kontinyu. Tinggal kita menentukan mana prioritas riset yang benar-benar kita mau dukung dan dibutuhkan untuk membangun daya saing nasional. Nah kalau pengembangan dananya sendiri, LPDP kan sudah mempunyai model pengembangan dana lewat investasi. Hasilnya itu yang perlu ditetapkan alokasinya. Mau ditaruh di mana pendanaannya atau ingin memakai model LPDP selama ini juga bisa,” jelasnya.

Insentif fiskal periset

Terkait peran fiskal dalam pengembangan penelitian di Indonesia, Rofyanto, Kepala PKPN, menjelaskan saat ini Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Perindustrian sedang menyusun peraturan pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Insentif yang akan diberikan ke perusahaan berupa fasilitas *super deduction* atas biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbangnya. Nantinya biaya terkait kegiatan litbang dapat dilipatgandakan maksimal 300 persen dari biaya litbang riil yang dikeluarkan. Dengan

begitu, beban PPh perusahaan yang melakukan kegiatan litbang di Indonesia akan berkurang.

“Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek akurasi kebijakan dan *inefficiency cost* dari kebijakan *super deduction*. Kegiatan litbang di Indonesia yang diberi fasilitas ini harus bisa memaksimalkan penciptaan *economic value added* untuk Indonesia,” jelasnya.

Lebih jauh, Rofyanto mengungkapkan saat ini telah terdapat beberapa fasilitas fiskal untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Fasilitas tersebut meliputi fasilitas pajak dalam rangka impor barang keperluan penelitian dan pengembangan di Indonesia, sumbangan WP dalam negeri kepada lembaga pendidikan atau lembaga penelitian di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sisa lebih yang diterima oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian yang dikecualikan dari objek pajak sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk sarana/prasarana paling lambat selama 4 tahun sejak sisa lebih diterima. Selain itu, bagi WP yang memperoleh fasilitas *tax allowance* dan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5 persen dari jumlah penanaman modal diberikan tambahan fasilitas tambahan kompensasi kerugian selama 2 tahun.

Teks Abdul Aziz



Laporan Utama

TULANG PUNGGUNG KEMAJUAN BANGSA

Sektor transportasi menjadi sektor pengonsumsi BBM terbesar di Indonesia. Pada 2016, sektor ini menggunakan 80,7 persen kebutuhan BBM nasional. Transportasi sulit beralih ke bahan bakar lain lantaran teknologi kendaraan bermotor sebagian besar masih berbasis BBM. Oleh karena itu, upaya substitusi BBM dengan bahan bakar lain perlu gencar dilakukan. Kendaraan listrik menjadi salah satu jawaban.

Dana riset turut berperan dalam pengembangan wisata bahari di Indonesia

Foto
Ahmad Faiz

"Kultur meneliti merupakan kunci bagi kemajuan sebuah bangsa."

Adi Cahyadi
Kepala Bidang
OECD Badan
Kebijakan
Fiskal

Riset dan pengembangan kendaraan listrik telah dilakukan sejumlah universitas di Indonesia, antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB). Ketua Tim Riset ITB Dr. Agus Purwadi mengungkapkan hasil risetnya dapat dimanfaatkan sebagai penggerak bus angkutan massal berbasis listrik serta kendaraan listrik roda dua dan roda tiga yang efisien dan ramah lingkungan. “Riset ini juga sangat bermanfaat untuk mengurangi dan membebaskan ketergantungan terhadap impor BBM yang sangat membebani keuangan negara.”

Substitusi Kebutuhan Impor

Agus memperoleh sumber pendanaan riset dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui skema Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Invitasi. Menurutnya, jumlah pagu anggaran riset yang lebih besar dibanding lembaga lain merupakan daya tarik utama pendanaan riset LPDP. Hal senada diungkapkan Dr. Ernawati Arifin Giri-Rachman, penerima dana RISPRO LPDP dari ITB dengan fokus riset bidang kesehatan dan obat.

“Skema pendanaan riset LPDP juga mendorong dilakukannya kegiatan riset terintegrasi yang melibatkan periset-periset dari latar belakang keahlian berbeda serta kolaborasi dengan dunia industri untuk komersialisasi hasil riset,” tambah Ernawati. Ia menegaskan, target risetnya adalah produk kit diagnostik pendeteksi virus hepatitis B yang tersertifikasi dan bisa dikomersialisasikan untuk mensubstitusi kebutuhan impor.

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Sektor wisata tak luput dari

perhatian para periset. Menggunakan pendanaan RISPRO LPDP, tim riset Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang dikepalai Dr. Ucu Cahyana mengembangkan model industri wisata edukasi bahari di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. “Model kegiatan wisata bahari yang baru berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan seni budaya, peningkatan kuliner khas Pulau Tidung, serta dapat mengatasi kerusakan lingkungan di Kepulauan Seribu melalui aktivitas wisata edukasi bahari,” terang pria yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNJ tersebut.

Ucu mengungkapkan pendanaan riset LPDP bersifat *multiyears* sehingga timnya dapat meriset dalam kurun waktu yang cukup untuk menghasilkan produk penelitian implementatif. Besaran anggaran dana riset juga disebutnya memadai untuk melakukan riset berkualitas. Sifat pendanaan yang inovatif dan produktif diakuinya memberikan tantangan untuk mengembangkan hasil riset yang dapat diimplementasikan di masyarakat.

Selama kegiatan riset berlangsung, Ucu menyebut masyarakat terlibat aktif mendukung berbagai kegiatan. “Bersama-sama periset, masyarakat terlibat dalam kegiatan penyediaan lahan, pembibitan mangrove, transplantasi terumbu karang, pemasangan papan nama, pembibitan tukik, pembibitan ikan nemo, dan ikut serta dalam *focus group discussion*,” tuturnya.

Dana Riset Masih Rendah

Saat ini penyediaan dana riset di Indonesia sebesar 0,25 persen dari PDB. Angka ini masih lebih rendah

dibanding negeri jiran Malaysia (1 persen dari PDB) dan Singapura (2,8 persen dari PDB). Ernawati berpendapat besaran anggaran tersebut telah dapat menggairahkan kegiatan riset di perguruan tinggi dan lembaga riset, tetapi belum dapat termanfaatkan optimal. Supaya riset dapat berdampak secara signifikan, menurutnya Indonesia perlu memiliki peta jalan riset sebagai acuan kegiatan riset. Selain itu, Indonesia juga perlu membangun kultur meneliti. “Kultur meneliti merupakan kunci bagi kemajuan sebuah bangsa. Kita bisa melihat bukti bahwa sebuah bangsa menjadi bangsa yang maju karena aktif melakukan penelitian,” ungkap Ernawati. Untuk mencapai kedua hal tersebut, ia mengharapkan anggaran penelitian ke depannya dapat lebih besar dari 0,25 persen dari PDB.

Senada, Ucu Cahyana mengharapkan jumlah dana riset dapat mencapai angka 1 persen dari PDB. Ia juga berharap lembaga pemberi dana riset dapat terus bertambah dan sistem pendanaannya bisa lebih fleksibel. Sementara itu, Agus Purwadi mengusulkan besaran anggaran riset mencapai sepuluh kali dari anggaran yang ada saat ini. “Mengacu dari pengalaman negara-negara maju, agar Indonesia juga dapat segera bertransformasi menjadi negara maju, maka investasi dalam bentuk pendanaan riset maupun inovasi di periode 2020-2025 harus ditambah porsinya secara bertahap, paling tidak mencapai 2,5 persen dari PDB,” ujar Agus Purwadi.

Teks Reni Saptati D.I.

Laporan Utama

MENGUNGKIT GAIRAH RISET NASIONAL

Sri Mulyani
Indrawati,
Menteri
Keuangan

Foto
Irfan bayu

Sejarah membuktikan bahwa perkembangan riset di suatu negara berbanding lurus dengan kemajuan dan keberhasilan bangsanya. Itu berarti riset berperan penting dalam perkembangan kehidupan dan peradaban. Melalui riset, bukan tidak mungkin berbagai persoalan bangsa dapat ditemukan solusinya. Lalu bagaimana perhatian pemerintah terutama dari sisi fiskal, terhadap kegiatan riset di Indonesia? Simak wawancara Media Keuangan bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berikut.

Bagaimana negara memandang pentingnya riset?

Indonesia sebagai suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar, memiliki *natural resource* dengan demografi muda. Artinya, Indonesia memiliki potensi dan kapasitas untuk bisa menciptakan momentum pembangunan yang kuat. Untuk itu, peranan teknologi dan riset menjadi sangat penting. Begitupun sejarah mencatat, negara-negara sukses di dunia adalah yang mampu menggunakan teknologi, mampu berinovasi, dan

meningkatkan kreativitas.

Indonesia sebagai suatu negara sebetulnya sudah mengenali bahwa peranan riset dan teknologi itu penting. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menginisiasi dibentuknya BPPT, LIPI, dan berbagai lembaga riset lain. Bahkan saat itu, kita juga mengirim cukup banyak orang ke luar negeri dalam rangka mendukung ide atau cita-cita untuk membangun suatu teknologi strategis, seperti penerbangan dan perkapalan.

Pada Era Industri 4.0 saat ini, perubahan teknologi digital memberikan kesempatan bagi negara untuk bisa mengejar. Banyak negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mampu untuk menghasilkan perusahaan-perusahaan baru, yang sifatnya inovatif, seperti perusahaan *digital unicorn*. Artinya Indonesia mengenali potensi naik dari negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi melalui investasi di bidang sumber daya manusia. Investasi dalam bentuk kebijakan pendidikan, penelitian, kesehatan, termasuk pengentasan kemiskinan dan kesenjangan menjadi

bagian komprehensif untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Indonesia.

Berapa besar pemerintah mengalokasikan dana riset saat ini?

Indonesia sesuai dengan mandat konstitusi mengalokasikan 20 persen APBN di bidang pendidikan, termasuk (di dalamnya) anggaran untuk penelitian. Namun mayoritas alokasinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendidikan karena masyarakat Indonesia mayoritas demografinya usia muda.

Saat ini belanja pendidikan kita mencapai lebih dari Rp490 triliun per tahun. Sebagian besar dialokasikan ke daerah untuk menunjang operasi sekolah dan madrasah. Sementara untuk riset, anggaran mencapai Rp35,7 triliun untuk 2019, atau meningkat dari sebelumnya Rp33,8 triliun pada 2018 dan Rp24,9 triliun pada 2016.

Bagaimana alokasi dan pengelolaan anggaran riset yang selama ini berjalan?

Pengelolaan anggaran riset sudah beberapa kali dibahas di Sidang Kabinet. Sebab hampir semua Kementerian memiliki Divisi Riset, sehingga tema risetnya kadang-kadang tidak satu koordinasi. Saat ini ada 52 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki alokasi dalam bentuk penelitian dan pengembangan. Diantaranya, ada tujuh lembaga yang sifatnya dedikatif untuk riset, seperti BPPT, LIPI, Bapeten, LAPAN, dan sebagainya. Jadi begitu terfragmentasi.

Saya belum tahu, kalau kita bedah sekarang berapa anggaran penelitian yang memang benar-benar untuk penelitian, berapa yang sebenarnya untuk *non* penelitian. Sebab yang kita khawatirkan jika anggaran dikelola di Kementerian/Lembaga dimana litbangnya memiliki *mindset* yang hanya birokratis dan bukan di dalam *mindset* lingkungan yang *curious* dan memiliki keingintahuan untuk menyelesaikan masalah serta meng-*address* suatu isu, maka anggaran yang besar itu tidak mencerminkan kemampuan dan kualitas untuk bisa melakukan riset. Bisa-bisa anggaran itu hanya habis untuk administrasi karena kita juga tahu penyakit anggaran secara umum. Sementara di perguruan tinggi, selain menggunakan anggaran universitas, mereka juga mencari sponsor. Jadi jika ingin men-*stimulate*, kita harus mengurangi biaya administrasi, sehingga anggaran penelitian *purely* adalah untuk penelitian.

Jika nanti dari Ristek Dikti bisa meng-*establish* dan mengordinasi riset ini, kita (Kemenkeu) tentu tidak masalah untuk meningkatkan anggaran risetnya (asalkan) bisa diukur dari sisi hasilnya, atau sisi tema yang merupakan prioritas, ataupun dari sisi

akuntabilitasnya kepada masyarakat.

Pada 2019 pemerintah mengalokasikan dana abadi riset. Bagaimana pelaksanaannya ke depan?

Ide dana abadi riset bahwa di dalam anggaran pendidikan kita sebesar 20 persen dari APBN, perlu adanya pemihakan kepada riset/penelitian. Jadi mulai tahun ini dialokasikan (dana abadi riset) sekitar Rp1 triliun. Bentuknya masih dalam desain dan diskusi dengan Kementerian Ristek Dikti, apakah akan terpisah dari LPDP, ataukah dia akan menjadi sama-sama co-exist, ataukah menjadi bagian di dalam LPDP. Sebab disamping dana abadi riset sebesar Rp1 triliun tadi, di dalam (anggaran) LPDP sendiri, yang saat ini mencapai lebih dari 60 triliun, juga ada dana untuk membiayai kegiatan riset.

Dana riset (LPDP) tersebut diberikan *on competitive basis* kepada masyarakat Indonesia. Diberikan juga kepada yang sudah bekerjasama atau mereka yang merintis kerjasama dengan penelitian atau pusat-pusat penelitian di luar negeri. Jadi seperti Inggris, dia punya Dana Penelitian, ada Newtown Institute. Mereka kemudian berpasangan dengan peneliti Indonesia untuk melakukan suatu riset di bidang-bidang yang mereka sepakati dan relevan dengan kepentingan Indonesia. Jadi (selama ini) kita juga memberikan dana riset melalui LPDP. Sementara untuk dana abadi riset sedang dalam penataan dan dalam (proses) diskusi.

Seperti apa upaya pemerintah dalam menstimulus perkembangan penelitian di Indonesia?

Upaya pemerintah dari sisi fiskal yaitu dengan (menyediakan) anggaran lebih banyak. Selanjutnya, memberikan insentif kepada

swasta, perusahaan-perusahaan yang sudah *well established* berupa *tax deduction*, bahwa kalau Anda mengeluarkan dana riset bisa menjadi *deductible* terhadap pajaknya, sehingga dia menganggap itu bukan biaya. Tujuannya agar mereka juga menganggap investasi di bidang penelitian itu tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan *spill over positif* kepada masyarakat.

Bahkan kita saat ini juga berpikir mengenai super *deductibility*. Artinya kalau Anda mengeluarkan seratus juta untuk riset, Anda bisa klaim dua ratus juta, atau dua kali lipat untuk pengurangan pajak Anda. Ini salah satu ide yang sekarang sedang di-*develop* oleh kita (Kemenkeu) dengan Kementerian Industri dalam rangka untuk mendukung atau men-*stimulate* sektor-sektor swasta di Indonesia untuk melakukan investasi di bidang penelitian.

Jadi di dalam ekosistem penelitian tidak hanya sekedar anggaran ditambah lagi, tapi sistem hukum yang melindungi *property right* juga sangat penting. Selain itu, dari sisi lingkungan yaitu sistem pendidikan. Bagaimana kegiatan belajar mengajar membuat anak-anak memiliki *space* untuk eksplorasi, *curiosity*. Kenyataannya anak-anak yang sekarang ini menghasilkan *unicorn* atau *startup* baru, justru berasal dari anak-anak yang *curious*. Teknologi informasi saat ini begitu maju, sehingga orang memiliki *opportunity* untuk melakukan penelitian dan inovasi secara mandiri. Lingkungan dan kultur seperti itu perlu terus ditingkatkan.

Teks Farida Rosadi

Trivia

Tahukah kamu?



Prof. Dr. Ali Wardhana adalah Menteri Keuangan terlama sepanjang sejarah. Ia menjabat selama 15 tahun atau mengalami tiga kali masa jabatan pada kabinet yang berbeda. Ia menduduki jabatan Menteri Keuangan sejak 1968 sampai dengan 1983.



Selain menjabat sebagai Menteri Keuangan terlama, Ali Wardhana juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia terlama, yakni sejak 1968 sampai dengan 1978.



Pria Taurus kelahiran Solo ini, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, mengalami dua kali devaluasi mata uang yaitu pada tahun 1977 dan 1978.

Kejar Ketertinggalan Pembangunan

Satu dasawarsa berlalu semenjak PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dibentuk pada 26 Februari 2009. Menjalankan mandat sebagai katalis pembangunan infrastruktur Indonesia, kehadiran salah satu *Special Mission Vehicles* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan ini telah nyata dirasakan manfaatnya. Penerangan untuk 3,2 juta rumah, air bersih untuk 8,1 juta jiwa penduduk Indonesia, pengairan untuk 185 ribu hektar sawah, serta fasilitas kesehatan untuk 720 pasien baru per tahun. Tak hanya itu, beraneka proyek infrastruktur yang dikerjakan PT SMI juga menciptakan lapangan kerja bagi 1,97 juta tenaga kerja selama masa konstruksi.

Emma Sri Martini mengemban tugas menakhodai PT SMI sejak pertama berdiri. Selama satu dekade kepemimpinannya, PT SMI berkontribusi dalam percepatan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia melalui 272 proyek senilai Rp1.270,8 triliun. Pada penghujung Mei 2019, ia resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Telkomsel. Dua pekan menjelang penunjukan tersebut, Media Keuangan berkesempatan untuk berbincang dengannya seputar pembangunan

infrastruktur Indonesia. Berikut petikannya:

Bagaimana Anda melihat kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini?

Bicara tentang *delivery* dari pembangunan infrastruktur, rasanya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita sudah melihat pembangunan *here and there*. Namun demikian, karena infrastruktur kita sudah *lagging*, masih di *ranking* yang sangat rendah dibandingkan dengan negara lain, kita masih harus terus berlari kencang. Di RPJMN berikutnya penekanannya memang di *Human Capital Developments*, tetapi tidak berarti pembangunan infrastrukturnya ditinggalkan. *It's a must* untuk bisa mendukung sektor lainnya. Sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan semua sektor lainnya pasti bergantung kepada *basic infra*-nya. Apa itu *basic infra*-nya? Akses transportasi atau konektivitas, listrik, dan air bersih. Itu tiga *basic needs* yang diperlukan masyarakat.

Seperti apa peran PT SMI dalam mendukung pembangunan proyek infrastruktur nasional?

Jika melihat dari sisi lembaga

pembiayaan infrastruktur sesuai mandat, kami menjadi sangat *confident* untuk bisa terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. *Confidence* dari ekosistem sudah semakin meningkat sehingga kami lebih meng-*address* hal-hal yang justru tidak dilihat oleh pasar. Dari awal memang intensi pendirian SMI seperti itu. Kami tidak mempunyai *license* sebagai perbankan, karena kami diharapkan bisa lebih fleksibel sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Produknya bisa varian, bisa *closing the gap*, dari mulai yang paling aman, *senior loan*, *junior*, *mezannine*, *equity* sampai dengan *equity investment*. Itu dibolehkan.

Apa saja program unggulan PT SMI dalam meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia?

Kembali lagi ke mandat kita sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur. Artinya, kami dimandatkan untuk *closing the gap* dalam hal pembiayaannya supaya meminimalkan beban APBN. Nah, artinya kami harus dapat menghasilkan produk-produk pembiayaan yang inovatif. Sistemnya tidak *crowding out market*, tidak *competing* dengan perbankan, tetapi justru



Emma Sri Martini, Direktur PT SMI

Foto Anas Nur Huda.

harus *crowding in*. Selanjutnya, kami juga harus membuat suatu proyek bisa menjadi *bankable* dan atraktif. Jadi, kuncinya adalah produk pembiayaan yang inovatif.

Sekarang, inovasi apa saja yang sudah dibuat oleh PT SMI? Antara lain *Cash Deficiency Support* (CDS), yaitu produk pembiayaan konvensional yang menjamin terbayarkannya kewajiban debitur kepada sindikasi perbankan. Skema ini sukses ditetapkan pada proyek Trans Sumatera. Produk inovasi yang lainnya yaitu *Takeout Financing*, *Ijarah Al Maushufah FI AL Dzimmah* (IMFZ), *Step up* MMQ Musykarah Mutanaqisah, dan *Contractor Pre-Financing* (CPF).

Apa yang melatarbelakangi perluasan pembiayaan ke sektor infrastruktur pariwisata, pendidikan, dan kesehatan?

Prioritas PT SMI untuk sepuluh tahun berikutnya meng-*address* sektor

kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Sektor jalan dan sebagainya dilanjutkan, tetapi tematiknya meng-*address* ke sektor tersebut, terutama kesehatan. Kenapa kesehatan? *Stunting ratio* kita nomor empat tertinggi di dunia. Bonus demografi bisa menjadi bencana kalau tidak disikapi secara lebih serius. Bukannya jadi bonus, malah malapetaka jika sembilan juta generasinya *stunting*.

Selain angka *stunting* yang tinggi, *Human Development Index* kita sangat rendah dan gizi buruk tinggi. Namun, sebetulnya pemicunya apa? Ternyata *stunting* itu diawali dengan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Jadi, kuncinya ada di infrastruktur sanitasi. Oleh karena itu, kita sedang banyak bergerak dengan teman-teman filantropi di bidang sanitasi.

Jadi, runtutannya ujung-ujungnya akan ke infrastruktur. Butuh sanitasi, butuh air. Air terkait dengan *water supply* kan? Butuh akses jalan, belum lagi jika jalannya naik turun. *It's all about infrastructure*. Infrastrukturnya bermacam-macam, ada di tujuh belas pilar SDG Indonesia One. Sama halnya seperti sektor pendidikan, skor PISA masyarakat kita rendah. Bagaimana kita mau menghadapi Revolusi Industri 4.0 jika *human capital quality* kita seperti itu? Bermula dari kesehatan itu tadi. Sehat dulu, baru bisa mendorong orang bisa sekolah. Saya sudah bicara dengan



Salah satu infrastruktur yang dibiayai oleh SMI

Foto
Dok. SMI

Menteri Keuangan tentang kontribusi seperti apa yang bisa dilakukan PT SMI di sektor pendidikan dan beliau *support* sekali.

Sektor pendidikan dan kesehatan selama ini berkembang berdasarkan *self financing*. Jika diberikan stimulus alternatif pembiayaan lain diharapkan akan dapat berkontribusi lebih dalam mengentaskan kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan ke sektor pariwisata juga sesuai dengan program pemerintah yang telah menunjuk sepuluh destinasi wisata yang akan menjadi prioritas utama untuk dikembangkan.

Sejauh ini, bagaimana minat Pemda terhadap fasilitas pembiayaan Pemda yang disediakan PT SMI?

Minat Pemda terhadap fasilitas pembiayaan yang disediakan PT SMI sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan *offering letter* (OL) yang diberikan oleh PT SMI disambut antusias oleh berbagai Pemda. Saat ini, potensi OL yang dapat dikembangkan menjadi pembiayaan oleh PT SMI hampir mencapai Rp6 triliun untuk 19 Pemda. PT SMI telah memberikan komitmen kepada Pemda sekitar Rp4 triliun. Diharapkan, potensi pembiayaan sebesar Rp6 triliun tersebut

dapat diutilisasi oleh Pemda dalam waktu dekat ini sehingga eksposur PT SMI pada pembiayaan terhadap Pemda dapat menjadi Rp10 triliun.

Saat ini melalui fasilitas pembiayaan Pemda, PT SMI juga telah memberikan dukungan pembangunan infrastruktur daerah yang hampir seluruhnya berlokasi di luar Pulau Jawa, dengan rincian 78 persen berada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, serta sisanya di wilayah Indonesia Barat di luar Pulau Jawa.

Apa saja tantangan yang dihadapi PT SMI dalam menjalankan mandatnya?

Tantangan utamanya ada di percepatan eksekusi. Kami mahir membuat *whish list* dan *planning*. Akan tetapi, *action plan* dan strategi implementasinya yang kadang dilupakan. Masterplan bagus, tetapi *how to execute* dan *action plan*-nya yang masih lemah. Secara umum, tantangan lain yang dihadapi antara lain koordinasi atas berbagai *stakeholders*, kesiapan proyek untuk dibiayai, keterlambatan progres proyek, proyek yang kurang *bankable*, keterbatasan regulasi sektor, percepatan *deal flow* melalui kerja sama dengan lembaga multilateral dan bilateral, pembebasan lahan, serta komitmen dan kesiapan PJPK.

Ke depannya, apa saja rencana PT SMI untuk mengoptimalkan perannya dalam pembangunan infrastruktur?

Kami telah menyusun sejumlah inisiatif strategi untuk pilar bisnis pembiayaan dan investasi, jasa konsultasi, dan pengembangan proyek. Selain itu, PT SMI juga akan mengoptimalkan pelaksanaan *Sustainable Development Goals Indonesia One* (SIO), suatu platform yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Platform ini telah memperoleh komitmen pendanaan dari lembaga bilateral/multilateral maupun lembaga filantropi yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nilai komitmennya hingga saat ini telah mencapai USD2,46 miliar. Dengan SIO ini diharapkan percepatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat lebih dioptimalkan lagi. Fasilitas yang dapat ditawarkan dalam platform SIO ini meliputi empat subplatform, yaitu *development*, *de-risking*, *financing*, dan *equity*.

Teks Reni Saptati D.I



MINISTRY OF FINANCE
FISCAL POLICY AGENCY



4th AIFC

ANNUAL ISLAMIC FINANCE CONFERENCE

JW Marriott Hotel Surabaya, July 24 - 25 2019

Blending Islamic Finance and Impact Investing for the SDGs

visit:

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/aifc2019/>

live streaming:



<https://bppk.kemenkeu.go.id>



KEJUJURAN DALAM MERAMU

HIDAYAT AMIR

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

Foto
Anas Nur Huda

Selembar tikar digelar di atas lantai sebuah rumah khas Jawa Tengah. Sepiring gorengan hangat dan kopi menemani udara dingin malam itu. Diskusi hangat pun mulai terbangun antara beberapa anak dengan sang Ayah. Salah satu sosok anak begitu antusias berdiskusi terkait fenomena sosial yang tengah hangat di masyarakat. Dengan diskusi yang konstruktif tersebut, kepekaan sosial dan nalar argumen yang baik pun terbentuk. Ia pun memperoleh banyak ilmu dan nasihat dari sang Ayah. Salah satunya adalah semangat untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Kini, sang pemuda tadi telah berhasil menamatkan pendidikannya hingga jenjang doktoral bidang Ekonomi dari University of Queensland, Australia. Ialah Hidayat Amir yang saat ini mengemban tugas sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Sosok sang Ayah yang juga penggemar budaya Jawa itu sering memberikan petuah dan pesan kepada Amir dengan menggunakan huruf Jawa. Banyak pesan yang secara tersirat menyampaikan makna agar ia selalu menjalankan nilai-nilai agama. Dengan begitu, Amir tidak hanya belajar terkait ilmu pengetahuan dan ilmu kompetensi saja. Dari sang Ayah ia juga banyak belajar nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan moralitas.

“Pesan beliau misalnya jangan tinggalkan sholat, tetap mengaji, terus selalu berbuat baik, bekerja keras, dan bangun pagi. Itu beliau tuliskan dalam bentuk buku kecil “*Ngudi Sejatining Becik*”, mencari keutamaan hakiki – yang dihadiahkan sebagai bekal kuliah ke negeri Kanguru,” kenangnya.

Evidence based policy

Selepas lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1994, Amir ditempatkan di Pusdiklat Perpajakan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

(BPPK). Selain melakukan manajemen diklat, ia memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada negara dengan menjadi seorang peneliti atau analis kebijakan. Pada tahun 2004, ketika kesempatan itu datang maka ia melamar menjadi peneliti di Badan Analisa Fiskal yang saat ini menjadi BKF. Ia pun berhasil. Saat itu, ia juga sedang menyelesaikan pendidikan magisternya di bidang Sains Ekonomi di Universitas Indonesia.

Menjadi peneliti memang membutuhkan perspektif yang lebih luas. “Kalau kita membuat kebijakan atau melakukan perubahan di dalam, maka perlu ada orang yang melihat secara kritis ke dalam. Jadi menjadi semacam *counterpart*-nya teman-teman pejabat struktural. Menyiapkan analisis atas suatu topik tertentu berbasis argumen-argumen ilmiah dan men-*challenge* kondisi *existing*. Tentu dalam konteks mencari jalan untuk perbaikan. Itu menariknya,” jelas Amir.

Selain itu, ia terinspirasi dengan Kepala BKF saat itu, Anggito Abimanyu, yang terus menanamkan nilai-nilai *research based policy* atau kebijakan yang berlandaskan pada riset akademis. Nilai tersebut memang merupakan hal baru di kala itu karena proses pengambilan kebijakan saat itu lebih didominasi oleh diskusi-diskusi dari rapat-rapat tetapi minim kajian ilmiah sebagai basis argumentasinya.

“Dengan berbasis riset, para pengambil kebijakan akan mengambil kebijakan dengan argumen akademis yang lebih matang, lebih mendalam, dan lebih komprehensif. Nah, sekarang hal itu telah diakomodasi. Setiap usulan perubahan aturan perundangan harus dilandasi dengan naskah akademik. Bahkan dalam naskah akademis tidak hanya disampaikan implikasi kebijakan dari aspek ekonomi atau ukuran dampaknya tetapi juga dilengkapi dengan pertimbangan aspek lainnya,” terangnya.

Untuk meningkatkan kemampuannya, ia pun melanjutkan pendidikannya

hingga meraih gelar doktoral Ekonomi di University of Queensland Australia pada tahun 2012. Terkait dengan kebijakan ekonomi, Amir memfokuskan program doktoralnya untuk membangun model analisis dampak suatu kebijakan di bidang fiskal. Hal ini dilandasi karena alat analisis kebijakan fiskal saat itu masih sedikit. Ia pun kemudian berhasil mengembangkan model *computable general equilibrium* (CGE) – INDOFISCAL.

“Begitu saya balik S3, ternyata tantangan untuk melakukan analisis itu semakin banyak. Bahkan setelah balik bekerja di BKF justru Model CGE ini menjadi semakin berkembang,” ungkapnya.

Jujur dalam meneliti

Menurut Amir, sifat alami dari peneliti adalah melihat suatu masalah secara utuh. Setelah dipahami, peneliti bertugas memberikan alternatif-alternatif solusi. Sementara itu, sebagai pejabat struktural, ia lebih berperan untuk mengatur aspek *knowledge* ini terkelola dan melakukan manajemen.

Menurut Amir, karena BKF lebih dekat dengan aspek penelitian dan analisis, ia ingin mendorong dalam memformulasikan sebuah kebijakan selalu berdasarkan *research based policy* atau *evidence based policy*. “Fokusnya bukan lagi mendalami masalahnya, tapi dari rekomendasi-rekomendasi *policy paper* itu secara cepat kita lihat terus, kita kelola agar menjadi sumber dalam pengambilan keputusan kebijakan. Ini harus kita komunikasikan ke *stakeholder*,” terangnya.

Untuk itu, menurut Amir, seorang peneliti berperan penting dalam menyampaikan informasi-informasi baru dari hasil penelitiannya, sehingga dapat mendukung para pengambil keputusan dalam mengambil kebijakan secara tepat dan efektif. Oleh karena itu, informasi yang dihasilkan harus berguna, relevan dan komprehensif agar mampu menjaga kualitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang berkualitas itu termasuk menggunakan data-data yang benar dan



Amir Bersama keluarga

Foto
Dok. Pribadi

dengan proses yang benar.

“Makanya peneliti tidak boleh bohong. Sampaikan saja apa adanya. Mana yang menjadi keunggulannya, dan mana kerugiannya. Keputusan itu selalu ada *trade-off*, tidak ada yang *one hundred percent* tidak ada *cost*-nya, itu tidak ada. Dalam ekonomi itu selalu ada yang namanya *opportunity cost*,” pesannya.

Egaliter dan petuah Jawa

Kedua orang tua Amir adalah sosok penggiat pendidikan yang egaliter. Sang Ayah, Noto Hadiwardoyo, adalah seorang guru yang kemudian diangkat menjadi Penilik Sekolah TK/SD. Jiwa seorang guru juga memotivasi sang Ayah untuk mengelola SMP swasta bersama dengan kedua sahabatnya. Mereka memang sengaja mendirikan sekolah karena menaruh perhatian yang besar terhadap dunia pendidikan.

Selain itu, sang Ayah merasa prihatin banyak siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena jarak sekolah yang ada cukup jauh dari kampungnya. Alhasil, selain menjadi SMP swasta tertua, sekolah yang didirikan sang Ayah juga menjadi sekolah swasta terbesar di kecamatan setempat. Sang Ayah juga merupakan pemerhati bahasa Jawa. Ia sering menggunakan aksara Jawa kuno dalam berkomunikasi dengan Amir. Pernah suatu ketika ayahnya mengabari kondisinya pasca kecelakaan dengan huruf Hanacaraka.

Sementara itu, sang Ibu, Sumini,

memiliki karakter yang hampir sama. Ibunya memiliki filosofi ‘*sopo temen tinemu*’ yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh akan dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Amir juga senantiasa diingatkan dengan petuah ‘*becik ketitik olo ketoro*’ yang berarti setiap kebaikan sekecil apa pun pasti akan diakui dan sebaik-baik menutupi kejahatan akan tercium juga pada akhirnya.

Tetap terhubung

Dibesarkan dengan suasana egaliter, Amir pun mendidik ketiga anaknya, Zaydan Azhar Hidayat, Hilmi Rusydi Hidayat, dan Hafiz Alim Hidayat, dengan prinsip yang sama. Misalnya dalam memilih tempat sekolah. Amir memberikan keleluasan anak-anaknya dalam memilih sekolahnya. Sementara itu, meski memiliki agenda pekerjaan yang padat, Amir tetap memperoleh dukungan sang istri, Hidayati Husna. Ia juga selalu menjaga komunikasi dengan istri dan anak-anaknya.

“Sekarang jarak sudah semakin abstrak karena ada alat komunikasi yang benaneka-macam. Saya dulu kalau sedang dinas itu biasa *Skype*-an dengan keluarga. Sekarang dengan adanya *WA (Whatsapp)* lebih enak lagi. Tinggal pakai *WA Call* kan. Jadi biar kita tetap ter-*connect* dengan anak-anak dan dengan istri karena kuncinya memang komunikasi,” jelasnya.

Harapan

Ditanya harapan terhadap

institusi Kementerian Keuangan, Amir mengungkapkan bahwa sebagai pionir dalam reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan perlu terus menjaga keberlanjutan dari proses tersebut. Ia menilai tantangan yang akan dihadapi Kementerian Keuangan ke depan akan semakin besar. Selain itu, ia juga berkeinginan agar keberhasilan reformasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dapat dijadikan referensi bagi Kementerian/Lembaga lainnya.

“Hal-hal yang sudah kita *telur*-kan sebagai praktik yang baik perlu juga disampaikan di tempat lain. Sehingga orang tidak perlu mengulang proses pembelajaran itu atau minimal proses pengulangannya menjadi lebih cepat. Proses pembelajaran dari instansi lain bisa lebih cepat atau bahkan bisa lebih baik,” harapnya.

Pribadinya sendiri menaruh harapan yang jelas. Ia sudah berkomitmen untuk menjadi birokrat yang baik di Kementerian Keuangan. Untuk itu, ia pun konsisten untuk menjadi pembelajar dengan menyiapkan pengetahuan dan kompetensi apa saja yang diperlukan. Dengan mempelajari, mengakumulasi, dan mendokumentasikannya, ia berharap akan semakin mampu berkontribusi lebih baik lagi kepada bangsa dan negara.

Teks Abdul Aziz

Opini

Evaluasi Tiga Tahun Masterplan AKSI

Bahtiar Fitkhasya Muslim,
Kepala Subbidang Kebijakan Asuransi, Dana Pensiun, dan Penjaminan Syariah, PKSK – BKF

Pada Desember 2015, Bappenas menerbitkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI). Masterplan ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan yang ada, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar domestik dan internasional, serta memposisikan Indonesia sebagai

pemain utama dalam keuangan syariah di dunia. Hingga hari ini, setelah berjalan lebih dari 3 tahun sejak pertama kali diluncurkan, terdapat beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan, serta masih banyak lagi yang sedang dalam proses maupun belum terlaksana.

Salah satu rekomendasi paling penting dan sudah berhasil diselesaikan adalah pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang akan bertindak sebagai badan “unggulan”

nasional. Pembentukan KNKS dilakukan untuk mencapai visi keuangan syariah dan akan mengawasi pelaksanaan Masterplan AKSI. KNKS dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah dan dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Perangkat kerja dan organisasi KNKS juga sudah siap bekerja, setelah Menteri PPN/Kepala Bappenas sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah KNKS, Bambang Brodjonegoro, melantik jajaran direksi KNKS pada Maret 2019 lalu.

Merujuk pada Masterplan AKSI, tugas yang diemban oleh KNKS sangat besar. KNKS adalah kunci untuk menciptakan visi nasional, koordinasi dan kepemimpinan yang sangat diperlukan bagi industri keuangan syariah. Selama ini, masing-masing pemangku kepentingan bekerja sendiri-sendiri dan belum berkoordinasi secara optimal. Meskipun para pemangku kepentingan tersebut telah berusaha keras untuk mengembangkan industri keuangan syariah, kenyataannya industri ini belum berkembang pesat karena usaha-usaha tersebut tidak berjalan ke arah yang sama.

Visi nasional dan koordinasi ini mutlak ada karena memang masing-masing pemangku kepentingan terbatas lingkup kerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Dalam sebulan pertama kerjanya, KNKS telah melakukan kunjungan ke berbagai pemangku kepentingan keuangan syariah termasuk ke Kementerian Keuangan. KNKS juga ikut terlibat dalam persiapan



Ilustrasi
Dimach Putra

Selain efek langsung berupa terbukanya akses bank syariah untuk penyaluran gaji PNS/TNI/POLRI yang jumlahnya cukup besar tersebut, kebijakan ini juga bisa mendukung inklusi keuangan syariah

seminar keuangan syariah internasional (4th Annual Islamic International Conference) yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan pada bulan Juli 2019.

Rekomendasi lain yang penting dan telah berhasil diselesaikan adalah mengumumkan kebijakan pemerintah untuk mendukung keuangan syariah dengan menyediakan iklim usaha yang setara bagi lembaga keuangan syariah. Kebijakan yang telah dikeluarkan dan diumumkan terkait hal ini, berupa fasilitasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang ingin penyaluran gajinya dilakukan melalui rekening bank syariah. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat. Dengan adanya PMK tersebut maka setiap PNS/TNI/POLRI berhak mengajukan kepada institusi tempatnya bekerja, untuk memindahkan penyaluran gajinya dari sebelumnya melalui rekening bank konvensional menjadi rekening bank syariah.

Kebijakan fasilitasi penyaluran gaji PNS/TNI/POLRI bisa memberikan perlakuan atau kesempatan yang sama kepada bank konvensional dan bank syariah dalam mengakses dana pemerintah yang jumlahnya cukup besar. Dalam APBN 2019 tercatat bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS/TNI/POLRI adalah sebesar Rp98 triliun. Selain efek langsung berupa terbukanya akses bank syariah untuk penyaluran gaji PNS/TNI/POLRI yang jumlahnya cukup besar tersebut, kebijakan ini juga bisa mendukung inklusi keuangan syariah.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa PNS/TNI/POLRI yang rekening gajinya sudah dipindahkan ke bank syariah selanjutnya pada saat membutuhkan pembiayaan juga akan mengajukannya kepada bank syariah yang menjadi payroll gajinya. Begitu juga ketika membutuhkan layanan keuangan lain seperti asuransi dan lain sebagainya. Alasan-alasan itulah yang menjadikan rekomendasi ini sangat penting. Kita patut bersyukur bahwa rekomendasi ini sudah terlaksana sejak tahun 2016.

Rekomendasi penting berikutnya yang berhasil diselesaikan adalah penempatan dana haji di bank syariah. Kewajiban penempatan dana haji di bank syariah sebetulnya sudah di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor

13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Berdasarkan kedua peraturan tersebut, bank yang bisa menjadi BPS BPIH hanya bank syariah dan bank umum

konvensional yang memiliki layanan syariah. Namun, meskipun sudah jelas di atur, pemindahan dana haji yang masih dikelola bank konvensional ke bank syariah baru sepenuhnya terjadi pada 2018 lalu. Maka, mulai 2018 sudah tidak ada lagi dana haji yang ditempatkan di bank konvensional.

Berdasarkan laporan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), dana haji yang dikelola sepanjang tahun 2018 adalah sebesar Rp 113 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 persennya ditempatkan di deposito bank syariah. Sementara sebanyak 50 persen sisanya, diinvestasikan di surat berharga. Pada tahun ini akan ada sedikit perubahan. Perubahan tersebut, yaitu 50 persen dalam bentuk deposito bank syariah, 30 persen investasi surat berharga, dan 20 persen investasi langsung yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Pelaksanaan kewajiban penempatan dana haji di bank syariah tersebut telah meningkatkan likuiditas bank syariah. Diketahui saat ini, sekitar 17 persen Dana Pihak Ketiga (DPK) di industri perbankan syariah berasal dari dana haji. Meningkatnya likuiditas bank syariah tersebut akan meningkatkan kemampuan pembiayaan bank syariah serta menurunkan margin pembiayaan yang dikenakan kepada nasabah. Sama seperti kebijakan penyaluran sebagian gaji PNS/TNI/POLRI di bank syariah, kebijakan

penempatan dana haji di bank syariah juga akan mendorong inklusi keuangan syariah. Sebab semakin banyak masyarakat yang berinteraksi dengan bank syariah (dalam hal ini calon peserta haji).

Masih Banyak Lagi Pekerjaan Rumah Meskipun beberapa rekomendasi penting dari Masterplan AKSI sudah berhasil dilaksanakan, tetapi masih banyak rekomendasi penting lainnya serta perlu untuk diselesaikan. Hal ini demi mewujudkan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Masterplan AKSI. Tujuan tersebut antara lain meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan yang ada, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar domestik dan internasional, dan memosisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di dunia.

Beberapa dari rekomendasi penting yang masih menjadi pekerjaan rumah diantaranya melakukan konsolidasi sektor perbankan syariah dengan melakukan merger untuk menciptakan pemain yang lebih besar dan kuat secara finansial. Selain itu, perlu diberikan peluang terbentuknya berbagai dana APEX baru untuk lembaga keuangan mikro. Hal lain yang juga tak kalah penting adalah mengubah struktur Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan memberikan peran lebih dalam mengelola sektor zakat dan wakaf. Penyelesaian rekomendasi-rekomendasi tersebut akan dikoordinasikan melalui KNKS. Meski demikian, pelaksanaannya ada di masing-masing lembaga yang menjadi penanggung jawabnya, termasuk di dalamnya adalah Kementerian Keuangan.

Ilustrasi
Dimach Putra



Menilik Kesuksesan Malaysia dalam Pengelolaan Zakat

Yuangga Friski Primayoga,
Direktorat Jenderal Pajak

Menurut konsep Islam, metode yang paling tepat untuk mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan adalah zakat. Konsep zakat hakikatnya erat dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial. Zakat menjunjung prinsip pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan antara pihak surplus dan defisit muslim secara ekonomi. Zakat sendiri merupakan kewajiban bagi para umat muslim karena dinyatakan secara tegas dalam Alquran dan merupakan rukun Islam kelima.

Berdasarkan data statistik, penduduk muslim di Indonesia berjumlah 207 juta jiwa atau 87 persen dari total penduduk. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Tentunya Indonesia memiliki potensi zakat yang besar dan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam pengentasan masalah sosial jika pengelolaannya terorganisasi, akuntabel, dan terarah. Data statistik zakat nasional yang dikeluarkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan total penghimpunan zakat pada tahun 2017 mencapai Rp6,2 triliun atau meningkat 24 persen dari penghimpunan tahun lalu. Meskipun meningkat signifikan, jumlah ini masih jauh dari potensi zakat yang dapat terkumpul. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sendiri mengatakan bahwa potensi zakat nasional di Indonesia sebesar Rp217 triliun. Jumlah ini setara dengan 57 persen dari total anggaran penanggulangan kemiskinan dalam APBN 2019. Karena besarnya potensi zakat yang dimiliki, pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan sistem yang dapat secara signifikan menjaring potensi penghimpunan dan mengoptimalkan penyaluran zakat nasional.

Malaysia sebagai salah satu negara muslim besar di dunia dianggap menjadi contoh sukses dalam pengelolaan zakat nasionalnya. Transformasi dalam pengelolaan zakat di Malayasia

bukan proses perubahan yang singkat.

Hingga tahun 1980-an, pengelolaan zakat di Malaysia masih dilakukan secara tradisional dan tanpa memiliki sistem jelas. Baru pada tahun 1991, pemerintah Malaysia mencoba melakukan pengelolaan zakat secara profesional melalui pembentukan Pusat Pungutan Zakat (PPZ).

Tingkat kesuksesan Malaysia dalam pengelolaan zakat tercermin dalam pertumbuhan jumlah pengumpulan zakat dan pembayar zakat

yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data laporan tahunan PPZ, pada tahun pertama pembentukan PPZ (1991), jumlah zakat yang dapat terhimpun adalah sebesar RM 1.3502.327,83 yang berasal dari 11.816 pembayar. Sementara pada laporan tahunan 2017, jumlah zakat yang berhasil dihimpun adalah RM 615.199.108,06 atau meningkat 4.456 persen dibanding dengan 28 tahun lalu. Sementara apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2016, jumlah penghimpunan zakat tumbuh sebesar 6 persen. Jumlah pembayar pun meningkat menjadi 184.377 pembayar.

Menilik kesuksesan pengelolaan zakat di Malaysia, berikut beberapa kiat sukses Malaysia yang dapat dijadikan *benchmark* dalam penerapan di Indonesia. Pertama, pengelolaan zakat dioperasionalkan oleh PPZ bentukan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) di masing-masing negara bagian yang berada di bawah kendali Perdana Menteri. PPZ dikelola

secara akuntabel dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan zakat nasional. Sementara penyaluran zakat dilaksanakan oleh Baitul Maal (BM) yang juga berada di bawah kendali MAIWP.

Pemisahan tugas fungsi pengumpulan dan penyaluran zakat ini memungkinkan terjadinya kontrol antar kedua lembaga tersebut dan juga oleh MAIWP yang menaunginya. Hanya kedua lembaga tersebut yang diperbolehkan untuk menjalankan fungsi penghimpun dan penyaluran zakat. Penghimpunan dan penyaluran zakat melalui lembaga lain dianggap sebagai kegiatan melanggar hukum. Berbeda dengan di Indonesia, penghimpun dan penyalur zakat dilaksanakan oleh lembaga yang sama. Selain BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah, fungsi tersebut juga dapat dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau lembaga lainnya yang tidak terdaftar secara resmi. Ini menyebabkan pengelolaan zakat nasional menjadi kurang terorganisasi dan terarah baik sehingga besarnya potensi zakat kurang dimanfaatkan secara optimal.

Selanjutnya, kepercayaan masyarakat akan PPZ dan BM di Malaysia begitu tinggi. Selain karena kedua lembaga tersebut dibentuk oleh undang-undang, keduanya selalu berusaha menciptakan *good governance* dalam pengelolaan zakat. Transparansi akan pengelolaan zakat pun dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui laman resmi PPZ dan BM. Selain laporan pertanggungjawaban tahunan, *board of directors* dan *audit committee* juga menjadi informasi resmi yang dapat diketahui sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di masing-masing negara bagian.

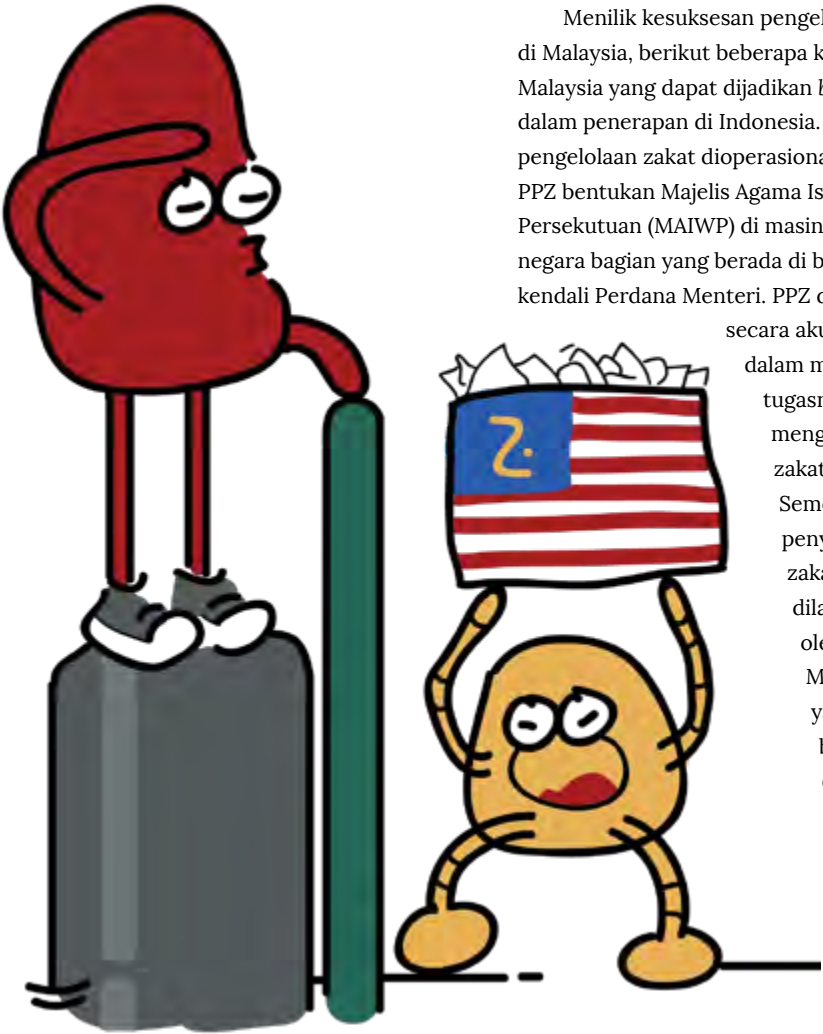
Partisipasi masyarakat Malaysia akan pemenuhan kewajiban pembayaran zakat juga begitu tinggi. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal. PPZ dan BM selalu melakukan inovasi atas penghimpunan dan pendistribusian zakat yang terkumpul. Kemudahan dalam pembayaran zakat

menjadi fokus utama melalui digitalisasi pembayaran zakat. Masyarakat mendapatkan berbagai kemudahan layanan yang disediakan seperti aplikasi iZakat, zakat dengan QR code, zakat *virtual assistant*, pembayaran berbasis kartu debit dan kredit, hingga *online salary deduction scheme*. Sosialisasi yang gencar juga dilakukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan kewajiban pembayaran dan peran penting zakat.

Sifat kewajiban pembayaran zakat tidak hanya didasarkan atas perintah agama tetapi juga diatur dalam undang-undang melalui Act 559 Syariah Criminal Offences (Federal Territories). Hukuman dan sanksi atas pelanggaran hukum terkait zakat disebutkan secara jelas mulai dari hukuman denda hingga kurungan penjara. Hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum zakat antara lain penolakan pembayaran zakat, kealpaan dalam pembayaran zakat, melakukan pengumpulan zakat secara ilegal di luar PPZ, hingga pembayaran zakat secara ilegal kepada lembaga selain PPZ.

Beberapa kunci sukses Malaysia dalam pengelolaan zakat tersebut bisa dijadikan acuan Indonesia dalam perbaikan ke depannya. Perbaikan dilakukan tentunya dengan memperhatikan kebutuhan dan kultur Indonesia yang tentunya berbeda dengan Malaysia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 diharapkan menjadi langkah awal dalam perubahan pengelolaan zakat yang transformasional di Indonesia. Diharapkan, pengelolaan zakat di Indonesia akan dapat mengoptimalkan potensi besar zakat yang dimiliki untuk pengentasan berbagai masalah sosial.

Ilustrasi
A. Wirananda





Potret Kantor

KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua

Wajah Kemajuan di Tanah Perbatasan

Bekerja di perbatasan antara dua negara merupakan sebuah profesi yang cukup menantang. Tak dipungkiri ada persaingan di antara keduanya. Namun bagi mereka, para garda depan penjaga kedaulatan NKRI, harus pandai menekan ego untuk menjaga iklim hubungan kedua negara tetap kondusif.

Seperti halnya unit vertikal bea dan cukai di daerah lain, Kantor Pengawasan dan Pelayabab Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Atambua bertugas mengawasi dan melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah Kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU) dan Alor. Bedanya, wilayah yang menjadi tanggung jawab kantor ini berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Timor Leste. Sejarah kantor ini diawali dengan terbentuknya KPPBC Tipe Pratama Atapupu, sebuah kantor kecil perwakilan bea dan cukai di area pelabuhan Kabupaten Belu.

Seiring dengan perkembangan arus lalu lintas orang dan barang, khususnya dengan adanya beberapa spot perbatasan Indonesia-Timor Leste, kegiatan yang

dilakukan pun meningkat. Perubahan ritme kegiatan tersebut menuntut adanya kenaikan tipe terhadap kantor tersebut agar pelayanan yang diberikan bisa semakin optimal. Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor: 206.3/PMK.01/2014 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : KEP-63/BC/2015, akhirnya Kantor Tipe Pratama Atapupu dihapuskan dan dibentuk KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua.

Penggantian tipe kantor yang kini telah menempati gedung baru di Jalan Adi Sucipto Atambua ini memberi semangat baru bagi seluruh pegawai di kantor tersebut dalam memberikan pelayanan dan pengawasan secara maksimal. Kantor modern Bea dan Cukai Atambua ini membawahi empat Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai (KBPBC) yaitu : Mota'ain, Motamasin, Wini, dan Napan,

serta 1 Pos Pengawasan Bea dan Cukai (PPBC) Turiskain. Dengan motto "Terdepan dan Terbaik!" KPPBC TMP B Atambua memiliki visi menjadi kantor bea dan cukai yang terdepan dan terbaik di wilayah perbatasan.

Melibas keterbatasan

Meski terletak di daerah perbatasan yang identik berkawan dengan segala keterbatasan, Bea Cukai Atambua terus berusaha untuk menunjukkan sebaliknya. Dibantu dengan tenaga kerja milenial yang mendominasi komposisi SDM kantor ini, sedikit demi sedikit mereka berbenah lewat simplifikasi teknologi. Bukan untuk sekedar pamer dan agar bisa jumawa, tujuannya hanya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat perbatasan.

"Saya tidak pernah memaksa



untuk ini itu, mereka sendiri yang inisiatif. Yang terpenting mereka bisa mengkomunikasikan ide mereka, kita dukung sepenuhnya sesuai kemampuan," jelas Tribuana Wetangterah, Kepala KPPBC TMP B Atambua. Beberapa inovasi berbasis teknologi yang berhasil mereka buat antara lain adalah AMANSA dan SILAWAN.

Amansa yang merupakan singkatan dari Aplikasi Mandiri SPMK Atambua, memudahkan mengurus surat permohonan masuk kendaraan para pelintas batas. Sementara itu, SILAWAN (Aplikasi Lintas Warga Antar Negara), menjadi kebanggaan kantor ini yang banyak memudahkan hilir mudik warga perbatasan melintasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Sebelum dirilisnya SILAWAN, warga perbatasan harus melakukan pendaftaran manual Kartu Identitas Lintas Batas (KILB). Hal tersebut mengharuskan para warga untuk datang sendiri ke kantor mengurus segala keperluan yang dibutuhkan. Proses administrasinya pun memakan waktu hingga tiga hari. Kini, cukup mengandalkan akses internet, warga perbatasan bisa mengurus KILB mereka di manapun. Dalam waktu satu jam mereka akan mendapat sms notifikasi apakah pendaftaran mereka diterima atau ditolak. Sungguh sebuah



inovasi yang menghasilkan solusi yang efektif dan efisien bagi kedua belah pihak.

Menjaga wajah Indonesia

Tidak dipungkiri persaingan antar negara memang ada, terlebih antar dua negara yang saling berbatasan langsung. Apalagi, jika kedua negara tersebut dulunya satu kesatuan. Persaingan tersebut makin terasa di daerah yang saling berbatasan. Namun, yang perlu diingat adalah bagaimana persaingan tersebut dapat dijaga dalam koridor yang positif. Hal tersebut juga disadari oleh Kepala KPPBC TMP B Atambua.

"Di perbatasan ini kita langsung *head to head* dengan negara tetangga, untuk itu peran bea dan cukai sangat penting dalam menjaga citra baik negara kita," ucap pria asal Alor yang akrab disapa Tri ini. Oleh karena itu, ia tak henti terus memotivasi jajarannya untuk selalu menunjukkan kinerja terbaiknya. Ia percaya bahwa dengan menunjukkan hal sederhana seperti bekerja dengan maksimal, itu dapat membantu menunjukkan profesionalitas punggawa-punggawa merah putih. Setidaknya, kepada para pendatang yang masuk dan datang dari tanah seberang

Ketika ditanya mengenai harapan ke depannya untuk KPPBC TMP B Atambua, Tri membagikan impiannya. "Sesuai motto Bea Cukai Atambua yaitu terdepan, terbaik, terutama untuk kantor bea cukai perbatasan. Terdepan dalam melahirkan inovasi yang mendukung kegiatan proses bisnis, dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna jasa," tutupnya.

Teks Dimach Putra

Pegawai KPPBC TMP B Atambua bertugas di PLBN Motaain

Pegawai BC Atambua memeriksa Customs Declaration

Tribuana Wetangterah, Kepala KPPBC TMP B Atambua

Jajaran BC Atambua selepas apel pagi di depan gedung KPPBC TMP B

Foto Abdul Aziz

Foto Dok. KPPBC TMP B Atambua

Juru Rembuk Kemaslahatan Rakyat

Kepala Subbidang Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Australia, Asia Pasifik, dan Afrika

Negosiasi. Mengacu pada informasi yang ditemukan pada laman KBBI daring, negosiasi memiliki arti proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Maka kira-kira demikianlah tugas yang diemban oleh Zainul Arifin selaku Kepala Subbidang (Kasubbid) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Australia, Asia Pasifik, dan Afrika. Merujuk pada peraturan yang berlaku tentang organisasi, Kasubbid P3B Australia, Asia Pasifik, dan Afrika memiliki tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan

peraturan dalam rangka perjanjian penghindaran pajak berganda untuk wilayah Australia, Asia Pasifik, dan Afrika. Dalam menunaikan tugasnya, sebelum mencapai produk akhirnya berupa P3B, pria kelahiran Sidoarjo ini perlu melalui proses negosiasi. Tak jarang, negosiasi ini menandakan waktu dan menguras isi kepala.

Cermat Sampai Mufakat

P3B disusun untuk mendorong arus modal serta alih teknologi dan keahlian ke suatu negara. Dengan adanya perjanjian perpajakan, transaksi perekonomian akan berlangsung lebih mulus serta mempererat silaturahmi antar negara. Sampai saat ini, Indonesia telah mengikat

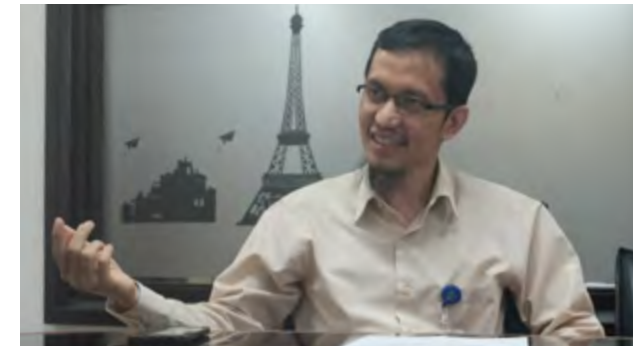
puluhan perjanjian perpajakan dengan negara-negara di wilayah Australia, Asia Pasifik, dan Afrika. "Total (di wilayah kerja) kita sekarang punya 69 P3B," Zainul memaparkan. Angka itu belum termasuk dengan negara-negara yang sedang dalam proses perundingan. Dengan adanya perjanjian perpajakan ini, beban investasi lintas batas negara menjadi lebih ringan sehingga diharapkan dapat meningkatkan perputaran arus perekonomian.

Kendati begitu besar dampak yang diharapkan pada arus perekonomian lintas batas negara, P3B tak disusun atas pertimbangan ekonomi semata. "Ada tiga aspek yang dinilai," ia melanjutkan "keekonomian, kompatibilitas perpajakan, kemudian politik kewilayahan." Selain

pertimbangan atas potensi keuntungan pada perekonomian, penyusunan P3B perlu melewati tahap analisis kompatibilitas perpajakan. Analisis ini menakar seberapa identik sistem perpajakan yang diterapkan di masing-masing negara. Analisis ini juga mengidentifikasi adanya pertentangan sistem perpajakan, bahkan potensi terjadinya tindakan penghindaran pajak. Sedangkan secara politik, perlu juga dilakukan analisis. Suatu perjanjian perpajakan bisa jadi memiliki dampak yang tidak terlalu signifikan secara ekonomi, namun secara politik berpengaruh sangat besar. Seluruh tahap analisis ini wajib dituntaskan oleh Zainul untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif.

Setelah usai dengan telaah akademis dan rekomendasi kebijakan telah disepakati, giliran Zainul mengemban tugas menyusun model perjanjian. Model ini nantinya akan diajukan kepada negara mitra, pun sebaliknya. Dari model yang diajukan itulah, nantinya perjanjian akan mulai diramu dan dirundingkan sampai mencapai mufakat. Pada tahap ini, Zainul dan timnya mesti teliti dan berhati-hati. Pantang baginya untuk kecolongan klausul-klausul yang berpotensi merugikan pihak Indonesia. "Ada pasal yang cukup krusial yaitu tentang tarif pajak dividen, *interest*, *royalti*," ia melanjutkan, "karena itu terkait dengan penerimaan pajak." Tarif pajak normal untuk luar negeri ke Indonesia sebesar 20 persen. Dengan adanya P3B, tarif pajak bisa lebih rendah daripada itu. "Umumnya (kesepakatan) kita (dengan negara mitra) sepuluh persen," Zainul memaparkan.

Hijrah dari satu perundingan ke perundingan yang lain adalah perkara biasa dalam penyusunan P3B. Tak banyak perjanjian yang bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Saat perundingan telah mencapai mufakat sekalipun, perjalanan



Zainul Arifin,
Kepala
Subbidang P3B
Australia, Asia
Pasifik, dan
Afrika



Renegosiasi
perjanjian P3B
dengan Uni
Emirat Arab

Perundingan
perjanjian
P3B dengan
Singapura

Foto
Anas Nur Huda
Dok. Pribadi

belum usai. Setelah model perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak, model tersebut mesti melalui proses legal untuk kelak akhirnya diundangkan. Di Indonesia, proses legal ini bisa memakan waktu yang cukup panjang. "Satu P3B itu belum tentu selesai dalam dua, tiga, empat tahun," papar pria yang telah 15 tahun mengabdikan pada Kementerian Keuangan ini.

Alih Lajur

Tak hanya P3B baru, Zainul juga menangani perubahan P3B yang telah ada sebelumnya. Banyak hal yang dapat mengakibatkan perubahan. Dinamika perekonomian global dan hubungan antar negara bisa jadi pemicu. Perubahan yang diminta pun tak melulu perihal tarif pajak. Sekali dua perubahan juga mencakup perluasan ruang lingkup industri yang dikenakan pajak atau bahkan permintaan pembebasan pajak atas industri tertentu yang dinilai dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Kendati demikian, pria yang megawali karir sebagai pegawai negeri di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini mengaku menikmati perjalanan karirnya di Badan Kebijakan Fiskal. Sepanjang karirnya menjabat sebagai Kasubbid P3B di Australia, Asia Pasifik, dan Afrika sejak 2015, Zainul telah menangani tujuh perjanjian. Dari tujuh perjanjian tersebut, dua perjanjian telah mencapai mufakat dan menanti proses penandatanganan, yakni P3B dengan Kazakhstan dan Uni Emirat Arab. Sedangkan terdapat satu perjanjian, yakni dengan Kamboja, saat ini masih dalam proses ratifikasi. Ia berharap siapapun nantinya yang akan memegang jabatan ini untuk terus mengembangkan kapasitas dan kehati-hatian. "Untuk sisi prosesnya, tentu saja kita ingin proses ratifikasi itu bisa lebih cepat dari sekarang," ujarnya di akhir perbincangan.

Teks A. Wirananda

Batasan Harga Rumah Tanpa PPN Dinaikkan, Harga Lebih Terjangkau

Riviu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebankan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Lahan yang semakin sempit mengakibatkan meningkatnya harga tanah dan bangunan setiap tahun. Hal ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit memenuhi kebutuhan

primernya, yaitu rumah. Saat ini, angka kekurangan rumah (*backlog*) di Indonesia masih sangat besar, sekitar 11,5 juta unit. Pemerintah telah berusaha mengatasi kondisi ini dengan program pembangunan sejuta rumah setiap tahun dan program lainnya. Meskipun realisasi program sejuta rumah pada tahun 2018 telah mencapai target, angka *backlog* masih tetap terjadi. Yaitu, sebanyak 400.000 unit setiap tahunnya.

Berdasarkan masukan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan mengubah aturan agar harga rumah semakin terjangkau dengan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah sederhana dan rumah sangat sederhana dengan kriteria tertentu. Penghapusan PPN tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN (PMK Nomor 81/PMK.01/2019). PMK ini mencabut berlakunya PMK Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 113/PMK.03/2014.

PMK Nomor 81/PMK.01/2019 disusun dengan pertimbangan perlunya memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.

Kriteria Rumah Tanpa PPN

Menurut PMK Nomor 81/PMK.010/2019, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah (1) rumah yang memenuhi ketentuan luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi), (2) harga jual tidak melebihi batasan harga jual (batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK Nomor 81/PMK.010/2019), (3) merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki, (4) luas tanah tidak kurang dari 60 m2, dan (5) perolehan rumah lebih fleksibel, yaitu bisa dengan cara tunai atau pun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi mau pun tidak bersubsidi atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Apabila pembeli rumah sederhana dan rumah sangat sederhana tidak memenuhi ketentuan tersebut, PPN yang semula dibebaskan wajib dibayar kembali oleh pembeli penerima fasilitas, yaitu paling lama satu bulan sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud.

Secara umum, PMK Nomor 81/PMK.010/2019 mengubah batasan harga jual rumah umum bebas PPN yang ditetapkan dalam PMK Nomor 113/PMK.03/2014 yang dikategorikan dalam lima zona. Berdasarkan PMK sebelumnya, batasan harga jual rumah yang bebas PPN di mayoritas daerah zona satu di pulau Jawa dan Sumatera maksimal senilai Rp130 juta, zona dua di Kalimantan Rp142 juta (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu). Adapun Bali, Jabodetabek, Maluku dan daerah lain berada di dalam zona tiga senilai

Rp148,5 juta dan untuk daerah Papua dan Papua Barat sebagai zona empat senilai Rp205.000. Dalam PMK Nomor 81/PMK.010/2019, diatur kenaikan harga jual terhadap rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari PPN sebesar 7,69% untuk zona 1, 7,75% untuk zona 2, 7,35% untuk zona 3, 6,40% untuk zona 4, dan 3,41% untuk zona 5.

Bangunan lain yang dibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu pondok boro, dengan kriteria merupakan bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan yang diperuntukkan bagi para buruh tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak diperoleh.

Selain rumah sederhana dan rumah sangat sederhana serta pondok boro, PMK Nomor 81/PMK.010/2019 juga mengatur pembebasan pengenaan PPN untuk asrama mahasiswa dan pelajar. Agar tidak terkena PPN, kriteria yang wajib dipenuhi dari asrama mahasiswa dan pelajar adalah bangunannya sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat yang dibangun dan dibiayai oleh universitas atau sekolah, perorangan dan pemerintah daerah diperuntukkan khusus pemondokan pelajar atau mahasiswa yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak diperoleh.

Perumahan lainnya menurut PMK ini yang dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi rumah pekerja, yaitu tempat hunian berupa bangunan tidak bertingkat atau bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan, dan diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersil. Mengenai pembebasan PPN terhadap rumah pekerja

berlaku ketentuan, yaitu untuk bangunan tidak bertingkat disesuaikan dengan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf d PMK Nomor 81/PMK.010/2019, atau untuk bangunan bertingkat sesuai dengan ketentuan mengenai rumah susun sederhana yang diatur dalam PMK tersendiri.

Rumah dan bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam juga bisa dibebaskan dari pengenaan PPN. Bangunan bagi korban bencana alam yang dibebaskan dari PPN bisa bersumber dari pendanaan pemerintah, swasta, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Penutup

Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia setiap tahun mengakibatkan kebutuhan perumahan juga meningkat. Terlebih, dengan semakin sempitnya lahan, membuat harga rumah semakin tidak terjangkau bagi masyarakat lapisan bawah. Adanya aturan pembebasan pengenaan PPN untuk beberapa jenis rumah dan bangunan diharapkan bisa memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sederhana dan sangat sederhana. Dengan semakin bergairahnya sektor perumahan, pembebasan PPN ini akan memunculkan keseimbangan antara produksi dan permintaan terhadap sektor perumahan. Sebagai sektor yang memiliki dampak *multiplier* yang besar, pertumbuhan sektor properti akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Terbitnya PMK Nomor 81/PMK.010/2019 sekaligus merevisi harga jual rumah sederhana dan sangat sederhana yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sesuai zona sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK 81/PMK.010/2019.

Teks Budi Sulistyo

Ilustrasi
A. Wirananda



Agar Pendar Impian Terus Menyala

Pulang kembali ke Indonesia dan menginjakkan kaki di kota Lombok, Nusa Tenggara Barat membuat Muhammad Baiul Hak tercengang. Hak –demikian dia disapa– seperti disadarkan akan kewajibannya untuk ikut serta membangun kembali kota kelahirannya tersebut. Terlebih, dia baru saja menuntaskan pendidikan masternya di luar negeri. Seperti diketahui, Lombok menjadi salah satu kota yang terdampak cukup parah akibat bencana gempa yang terjadi pada 2018 silam.

Hak menuturkan, akibat gempa, pertumbuhan ekonomi Lombok pada sektor unggulan menurun drastis. Baik pada sektor pertambangan, maupun pertanian. Tidak hanya itu, sektor pariwisata di wilayah NTB juga kian lesu. Hal ini ditandai dengan turunnya jumlah wisatawan lokal dan mancanegara. Melihat hal ini, dia menyadari sepenuhnya kebutuhan NTB dalam *recovery* kondisi ekonominya. Perbaikan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif oleh semua pihak. Bukan semata mengandalkan pemerintah.

Pada titik ini, Hak bersyukur atas kesempatan yang diberikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk membiayai studinya selama menimba ilmu di University of Adelaide, Australia. “Dengan ilmu yang saya peroleh, saya semakin terstruktur dalam membaca suatu permasalahan masyarakat untuk bisa bergerak dengan tepat membantu permasalahan mereka,”ungkapnya.

Mimpi jadi nyata

Hak menyelesaikan pendidikan masternya di University of Adelaide pada Desember 2018. Bidang ilmu yang dia tekuni adalah Ekonomi Terapan. Berkuliah di salah satu negara maju, Australia, adalah impiannya sejak kecil. Selain kemajuan sistem pendidikan



Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng
Telp/Faks. 1500652
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Muhammad Baiul Hak ditemani keluarga kecilnya saat kelulusannya dari The University of Adelaide

Foto dok. Pribadi

yang dimiliki, Hak ingin menjalin *global networking*, serta mempelajari kearifan lokal yang dimiliki kota Adelaide. Kota yang ditopang oleh sektor pertanian, tapi bisa tumbuh dan berkembang.

“Kota Adelaide menjadi destinasi dikarenakan kotanya tidak begitu besar dengan pertanian sebagai penopang utama perekonomian. Saya ingin belajar bagaimana Kota Adelaide tumbuh menjadi kota maju dan nyaman,”akunya.

Ekonomi adalah bidang ilmu yang digemari Hak sejak di bangku kuliah. Itu pula sebabnya, bidang pendidikan sarjana yang dia ambil juga berkaitan dengan ekonomi. Saat berada di kelas maupun

luar kelas, diskusi dengan para dosen di Universitas Mataram menjadi rutinitas. Bahkan, dia tidak segan untuk berdiskusi langsung dengan para pelaku ekonomi di NTB.

Diakui Hak, motivasinya mendalami bidang Ekonomi Terapan didorong saat dirinya menjalani Kuliah Kerja Nyata. Saat itu, Hak bersama teman satu timnya mendalami diversifikasi dan peningkatan kualitas pada produk kerupuk kulit sapi di wilayah NTB. “Teori dan konsep yang kami pelajari di kelas ternyata tidak semuanya bisa diterapkan di kehidupan nyata,”kisahnya. Menurut Hak, aspek psikis dan *mindset* masyarakat menjadi satu tantangan tersendiri. Terutama, dalam proses pengembangan produk. Dari situlah keinginannya mendalami bidang Ekonomi Terapan semakin menjadi.

Satu visi

Hak begitu mensyukuri keberadaan LPDP dalam menyokong kebutuhan anak bangsa untuk melanjutkan sekolah hingga pendidikan tinggi. Dia menuturkan, visi dan misi LPDP begitu sejalan dengan prinsip yang selama ini dia pegang. “Saya ingin menjadi bagian dari kaum professional. Sekaligus, (menjadi) pemimpin masa depan Indonesia,” harap pemuda yang juga aktif sebagai Postgraduate Student Representative The University of Adelaide semasa kuliah ini.

Disebutkan Hak, dalam memperoleh beasiswa LPDP, bahasa menjadi ganjalan terbesar baginya. “Karena sejak awal saya tidak menyukai bahasa Inggris,”akunya. Berbekal kesungguhan Hak untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya, LPDP bisa mewujudkan impiannya kuliah di luar negeri. “Alhamdulillah, bermodalkan skor TOEFL rendah, LPDP memberikan saya kesempatan untuk

menerima pengayaan bahasa, sehingga ada kesempatan untuk perbaikan kemampuan bahasa asing,” Hak mengisahkan.

Kehidupan perkuliahan begitu dinikmati oleh pemuda yang telah memiliki satu putri kecil ini. Berkutat dengan tumpukan jurnal dan artikel, menganalisis konsep dan fakta, hingga mengerjakan beragam tugas kelompok bersama para pelajar dari seluruh dunia bukan perkara mudah. Namun, tantangan tersebut dia jalani dengan suka hati. Hak juga perlu memastikan agar kepentingan kuliah, keluarga, serta organisasi bisa saling berjalan tanpa mengganggu satu sama lain.”Secara garis besar, tantangan terberat adalah manajemen waktu,”katanya.

Tidak heran, sebab selain disibukkan kegiatan kuliah yang demikian padat, Hak tidak menyiapkan kesempatan untuk mempelajari hal menarik selama di Australia. Pada beberapa kesempatan, Hak menyempatkan untuk mengunjungi pusat pertanian kota Adelaide untuk mempelajari sistem pertanian di sana. Dia juga belajar banyak mengenai sistem transportasi kota Adelaide yang telah terintegrasi dengan baik. Hal ini dia lakukan di sela-sela kesibukannya sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PIA) The University of Adelaide dan General Secretary Indonesian Muslim Association of South Australia.

Tidak berhenti bergerak

Selepas menjalani pendidikan, Hak bergabung dengan Mata Garuda sebagai wadah bagi awardee lama bergabung, pada 2019, Hak dipercaya memangku jabatan sebagai Ketua Mata Garuda untuk Provinsi NTB.

“Saat ini, kami sedang menggodok pembentukan satu Lembaga Semi Otonom di Mata Garuda yang menjadi wadah

bagi para alumni untuk berkarir sebagai peneliti,”ceritanya. Dia melanjutkan, lembaga berkeinginan sebagai otoritas dari Mata Garuda yang akan menerbitkan data dan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

Selama menjalani amanah sebagai Ketua Mata Garuda NTB, Hak mulai tertarik dengan permasalahan lingkungan di wilayahnya. Salah satunya terkait masalah sampah. Untuk itu ke depan, dia berkeinginan mendalami ilmu ekonomi lingkungan. “(Harapannya) saya bisa mendirikan sebuah organisasi non-profit yang fokus utamanya adalah menjadi solusi bagi permasalahan limbah sampah dengan menerapkan sistem 3R, yaitu reuse, reduce dan recycle,” ucapnya yakin.

Menjaga mimpi

Hak begitu ingin agar kemewahan dalam menjalani pendidikan tinggi dapat pula dirasakan oleh semua anak bangsa. Apalagi, pemerintah telah berupaya menyediakan banyak akses untuk itu. “Maka pastikan, kalian harus membuang kata “tapi” ketika ingin meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” pesannya. Dia menambahkan, agar para pelajar tidak lelah dalam menuntut ilmu, “Karena ilmu itu akan menjadikan kita mulia di dunia dan akhirat,”lanjutnya.

Hak mengapresiasi upaya LPDP untuk terus berbenah dari tahun ke tahun. Meski demikian, dia berharap agar LPDP juga memiliki sebuah program atau kebijakan yang bisa memastikan agar para alumni LPDP bisa berkontribusi bagi negara selepas menjalani pendidikan. “Karena yang terpenting adalah apa yang alumni perbuat selepas studi,”ungkapnya menutup cerita.

Teks Farida Rosadi

Layanan apa yang bisa Kamu dapat dari Kring Pajak?



Saluran Telepon



Live Chat



@kring_pajak

Layanan Lupa EFIN

*EFIN dikirim dalam bentuk PDF ke email terdaftar

Informasi NTPN

Pengaduan

Layanan Konfirmasi Kebenaran SKF

Pembuatan Kode Billing

Konsultasi Perpajakan

Kode Verifikasi Pengiriman SPT



1 500 200

www.pajak.go.id

Bugar

Jangan Remehkan Sindroma Metabolik

dr. Rizki Dinar E.
(Balai Kesehatan Kementerian Keuangan)

Foto
Anas Nur Huda

Ilustrasi
A. Wirananda

Banyak orang menyepelekan kondisi kesehatan tertentu dalam dirinya dengan alasan tidak ada riwayat penyakit keluarga. Anggapan tersebut salah. Gaya hidup kurang sehat dapat memicu kenaikan gula darah dan tekanan darah meskipun tanpa riwayat keturunan diabetes atau hipertensi dalam keluarga. Kondisi tersebut menggambarkan sindroma metabolik.

Sindroma metabolik merupakan kumpulan gejala kenaikan tekanan darah, kenaikan gula darah, kelebihan lemak tubuh di sekitar pinggang, serta peningkatan kolesterol secara berlebihan yang terjadi bersamaan. Kumpulan gejala dimaksud memicu penyakit berbahaya seperti diabetes melitus, hipertensi, stroke, bahkan penyakit jantung yang dapat berakibat pada kematian, sekalipun tidak ada riwayat penyakit dalam keluarga.

Untuk mendapatkan diagnosis pasti, sindroma metabolik harus memenuhi tiga dari lima gejala-gejala berikut. Pertama, obesitas sentral atau lingkaran perut besar. Normalnya, lingkaran perut laki-laki sekitar 90 cm dan wanita tidak lebih dari 80 cm.

Di atas ukuran tersebut, risiko hipertensi dan penyakit jantung akan meningkat. Kedua, kadar gula darah puasa selalu di atas angka 100mg/dL. Ketiga, kadar trigliserida >150mg/dL atau sedang dalam pengobatan kolesterol. Keempat, kadar HDL atau kolesterol baik pada pria <40mg/dL dan pada wanita <50mg/dL dengan peningkatan kadar LDL atau kolesterol jahat di atas normal. Terakhir, tekanan darah tinggi dengan kadar sistolik dan diastolik di atas 130/85 mmHg atau orang tersebut sedang dalam pengobatan hipertensi.

Pada orang awam, gejala-gejala di atas tidak bisa dideteksi kecuali dengan pemeriksaan laboratorium dan pengukuran secara klinis. Namun, Anda tetap bisa mengenali gejala-gejala kenaikan gula darah dan darah tinggi secara kasat mata. Kenaikan gula darah ditandai dengan tenggorokan haus terus menerus dan intensitas buang air kecil yang makin sering. Sementara itu, kenaikan tekanan darah biasanya ditandai nyeri kepala bagian belakang, kekakuan leher, serta jantung berdebar.

Segera konsultasikan ke dokter

untuk mendapatkan pemeriksaan tes darah lengkap jika mengalami gejala di atas. Penanganan yang tepat meminimalkan akibat. Pengobatan pun dapat cepat dilakukan. Selain pengobatan, dokter akan menyarankan gaya hidup sehat seperti memperbanyak konsumsi sayur dan buah, menghindari makanan cepat saji, dan mengusahakan berat badan ideal. Sangat disarankan berolahraga rutin minimal tiga kali seminggu dengan durasi 30 menit serta berhenti merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Selain itu, lakukan pengecekan rutin tekanan darah dan darah lengkap untuk mengontrol kadar kolesterol dan gula darah tubuh. Terakhir, jauhi stres.

Sebab Yang Mahal itu Semangat

Foto
Anas Nur Huda

Mata pemuda itu berbinar-binar, layaknya bocah kecil yang gembira saat diajak bertamasya oleh sang ibu, lalu melihat penjual permen lollipop dihadapannya. Pakaian sang pemuda begitu rapi dan bersih dengan padu padan busana yang tak berlebihan, tapi tetap menawan. Hal itu semakin memantapkan langkah kakinya menuju sebuah gedung perkantoran. Orang-orang yang melihatnya tentu bisa merasakan aura positif yang terpancar dari raut wajah sang pemuda. Meski wajahnya menyiratkan sedikit kecanggungan karena memasuki lingkungan baru, akan tetapi langkahnya dipenuhi dengan semangat dan harapan baru.

Barangkali, itulah sedikit gambaran tentang seorang pemuda yang baru pertama kali memasuki dunia barunya, dunia kerja. Sebagian dari kita, pasti pernah mengalami gairah itu. Tentang antusiasme dan rasa syukur karena telah berhasil melalui transisi dalam kehidupannya. Tentang kebahagiaan akan harapan untuk bisa mandiri secara finansial, serta tentang gelora masuk ke lingkungan yang baru, berjumpa teman

baru, dan yang pasti, kemampuan baru.

Namun, apa yang terjadi lima atau bahkan sepuluh tahun kemudian? Deraan rutinitas, beban kerja, hingga masalah-masalah pekerjaan nyatanya tak jarang menjadikan semangat yang menggelora saat itu semakin pudar. Bahkan, hasil riset Gallup menunjukkan, hanya 8 persen karyawan di Indonesia yang benar-benar memiliki level *engagement* yang tinggi, komitmen, dan motivasi yang kuat dengan pekerjaannya. Sisanya, atau 92 persen lainnya, melakukan pekerjaannya dengan begitu-gitu saja: berangkat, absen, tugas selesai, pulang, absen lagi, lalu terima gaji di akhir bulan. Semuanya hanya menjadi rutinitas!

Ada beragam faktor yang bisa menjelaskan, kenapa seorang pekerja tidak termotivasi dengan pekerjaannya. Namun, terlepas dari faktor pencetus yang berasal dari sisi lingkungan tempat kerja, sejatinya, diri kita sendirilah yang harus memelihara semangat itu. Jika kita berpikir bahwa kebosanan dan kejenuhan hanya terjadi di lingkungan perkantoran, kita juga patut berpikir ulang. Sebab kebosanan, kejenuhan, atau hilangnya semangat kerja,

bisa terjadi pada profesi apapun. Baik karyawan perkantoran, wirausahawan, pengusaha, guru, dokter, bahkan *freelancer* sekalipun. Maka, tak heran, tarif seorang motivator bisa mencapai ratusan juta. Sebab membangkitkan semangat seseorang bukanlah perkara mudah.

Banyak teori yang mengarahkan kita untuk mampu mencari *passion*. Alasannya, *passion* bisa menjadi kunci untuk menjaga semangat bekerja. Lalu, bagaimana jika pekerjaan kita saat ini bukanlah *passion* kita? Atau justru ternyata kita tidak tahu menahu apa *passion* kita sesungguhnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah meredefinisi ulang tujuan kita bekerja. Semakin detail definisi tujuan kita bekerja, akan semakin mudah bagi kita menemukan semangat itu. Jika ternyata saat ini tujuanmu belum ditemukan, maka carilah. Temukanlah dia.

Sungguh berbahagialah mereka yang selalu menikmati dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Sebab, mereka bisa terus menjadi “pegawai baru”.

Teks Yani Kurnia Astuti



Judul:
Kata
Pengarang:
Rintik Sedu
Tahun Terbit:
2018
Dimensi:
404 Halaman

Kunjungi Perpustakaan
Kementerian Keuangan
dan Jejaring Sosial Kami:
Gedung Djuanda I Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat



Perpustakaan
Kemenkeu
Perpustakaan
Kementerian
Keuangan
@kemenkeulib

www.perpustakaan.
kemenkeu.go.id

5 Buku Buku Pilihan Perpustakaan Kemenkeu:

- 1 [21 Lesson for The 21st Century](#)
Yuval Noah Harari
- 2 [Orang Orang Biasa](#)
Andrea Hirata
- 3 [The Seven Dials Mystery: Misteri Tujuh Lonceng](#)
Agatha Christie
- 4 [The Corporate University Handbook: Designing, Managing, and Growing a Successful Program](#)
Mark Allen
- 5 [Tintin dan Picaros](#)
Herge

Kata: Tentang Senja yang Kehilangan Langitnya

Novel berjudul “Kata” karya Nadhifa Allya Tsana atau yang biasa disapa dengan nama pena Rintik Sedu mengangkat tokoh utama Nugraha dan Binta. Binta merupakan sosok perempuan yang cantik namun bagaikan hidup dalam dunianya sendiri. Dia dengan sengaja membatasi pergaulan dengan orang lain. Dia tidak punya banyak teman. Hanya ada satu teman dekatnya yaitu Cahyo. Dia juga berusaha untuk tidak jatuh cinta. Hingga akhirnya datang seorang pria bernama Nugraha yang mengujarnya. Dia berusaha mendapatkan perhatian Binta dengan berbagai cara. Kata-kata indah mengalir dari mulut Nugraha, seiring dengan perhatian yang diatujukan. Namun Binta masih belum percaya dengan Nugraha. Binta berusaha menjauh, Nugraha terus berusaha mengejar.

Sebenarnya ada satu tokoh lagi dalam novel ini yang kehadirannya sangat jarang terungkap tetapi menjadi latar belakang kehidupan Binta. Dia bernama Biru. Binta selalu rindu dengan kehadiran Biru yang menjadi salah satu alasan Binta untuk bertahan hidup. Berkat bantuan Cahyo, suatu hari Binta dipertemukan dengan Biru di suatu tempat bernama Banda Neira. Namun pertemuan bukannya mengobati rindu Binta, malah membuat hati Binta semakin tidak membaik karena Biru yang selama ini hanya menganggapnya tidak lebih dari seorang sahabat. Semua itu terpaksa dikatakan oleh Biru demi masa depan Binta. Biru sadar jika masa depannya belum jelas mengingat

dia yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan hanya menghabiskan hidupnya untuk berpetualang. Binta semakin rapuh, hidupnya semakin tidak berdaya. Beruntung Nugraha selalu ada menjadi penawar semuanya.

Apakah kisah mereka berakhir sampai sini? Tidak, kisah tokoh dalam novel romansa ini ternyata semakin rumit dengan kehadiran Sinta, masa lalu Nugraha, dan kehadiran Biru ke Jakarta secara tiba-tiba. Ditambah lagi dengan Nugraha yang mendapat beasiswa ke Australia. Lalu bagaimanakah akhir kisah Binta, Biru, dan Nugraha? Ending dari novel ini memiliki cerita yang tidak terduga-duga yang perlu Anda baca sendiri.

Sang penulis, Rintik Sedu, berhasil membuat para pembacanya terbawa perasaan dengan kisah asmara antara Binta, Biru, dan Nugraha. Bahasa yang digunakan oleh penulispun ringan dan dengan mudah dimengerti oleh semua umur. Kisah dalam novel ini berhasil membuat para pembaca sangat penasaran dengan akhir cerita siapakah yang akan dipilih oleh Binta.

Novel ini ingin menyampaikan kepada pembacanya bahwa cinta tak melulu membutuhkan sebab. Cinta tak melulu harus ditanya dan dijawab. Acapkali kita lupa bahwa cinta tak selalu tentang yang kita inginkan, melainkan tentang yang kita butuhkan.

Peresensi Tria Pamekasih



Natuna, Surga di Penghujung Utara

Terletak di penghujung utara Indonesia tak membuat Natuna kehilangan daya tariknya. Berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang memanas beberapa saat lampau, Natuna yang merupakan salah satu kabupaten di Kepulauan Riau kini kembali dilirik sebagian orang, termasuk saya.

Usai menempuh perjalanan selama 1 jam 30 menit dari Bengkulu, saya transit di Batam. Dibutuhkan waktu 1 jam 40 menit agar dapat menginjakkan kaki di Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna. Perjalanan dari Bengkulu menuju Natuna ini menggunakan pesawat baling-baling. Meskipun memerlukan *extra effort*, kita tak akan menyesal begitu tiba di Natuna. Pantainya indah dan dihiasi batuan granit, alam bawah lautnya menawan, serta makanannya lezat.

Kita dapat menyewa pompong (perahu) milik nelayan



pemandangan indah di Natuna

Foto
Tommy Rizki

setempat untuk mengunjungi pulau-pulau sekitar Natuna. Pulau Senoa, Pulau Panjang, Pulau Setanau, dan Pulau Setahi merupakan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Bunguran Besar. Pesona utama pulau-pulau itu ada pada keindahan bawah airnya. Terumbu karangnya begitu subur, ikan berwarna-warni berenang bebas. Pemandangan ini menandakan Laut Natuna masih sangat kaya. Sudah selayaknya Natuna menyandang titel surga *diving* maupun *snorkeling*.

Pulau Panjang yang dikenal dengan *Turtle Island* menawarkan *diving* dan *snorkeling* bersama penyu. Di pulau tersebut juga terdapat penangkaran penyu. Pulau Senoa dengan mercusuarinya tak kalah cantik dengan Pulau Lengkuas di Belitung. Sementara itu, Pulau Setanau memiliki gosong (pasir yang menjorok ke laut dan membentuk daratan) yang hanya muncul saat air laut surut. Adapun Pulau Setahi merupakan destinasi baru di Natuna. Pulau-pulau tersebut belum begitu ramai pengunjung, sehingga

jika Anda berkunjung ke sana akan serasa kunjungan ke pulau pribadi.

Selain pemandangan bawah air yang memukau, pantai di Natuna juga sangat elok. Pantai Teluk Selahang memiliki pasir putih bersih serta ombak tenang yang cocok untuk berenang. Di sisi pantai, terdapat pula para penjual makanan khas Natuna, yaitu kernas dan tabel mando. Kedua makanan itu cocok dinikmati bersama air kelapa muda segar sembari menatap indahnya pantai. Pada umumnya pantai di Natuna dihiasi batu granit berukuran besar, terutama di pinggir timur Pulau Bunguran. Formasi granit yang indah di Pantai Batu Kasah menjadi salah satu daya tarik utama. Selain itu, Batu Sindu dengan batu granit raksasanya menjadi tempat paling asyik untuk melihat matahari terbit.

Destinasi selanjutnya adalah Pulau Akar, salah satu tempat wisata hasil pembangunan menggunakan Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Hamparan bebatuan dan pasir yang asri cocok sebagai tempat melepas penat.

Jika ingin menjelajahi wisata religi, tempat tujuan yang harus disambangi berikutnya adalah Masjid Agung Natuna. Masjid terbesar di Kabupaten Natuna ini memiliki kemiripan dengan Taj Mahal di India. Adanya saluran air di depan masjid menjadi kemiripan utama. Didominasi warna hijau dan putih, masjid ini sungguh sayang untuk dilewatkan.

Untuk urusan bermalam, banyak penginapan di sekitar Kota Ranai. Harganya memang sedikit di atas rata-rata kamar di daerah lain. Jika menginginkan sensasi berbeda, Alif Stone Park menawarkan tempat menginap di antara bebatuan. Penginapan milik Bapak Both Sudargo yang merupakan arsitek Masjid Agung Natuna ini merupakan penginapan favorit Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat berkunjung ke Natuna.

Teks Tommy Rizki

Dana Penyelamat Saat Darurat

Foto
Arfindo Briyan

Sudah sering para perencana keuangan menjelaskan tentang Dana Darurat. Bahkan saya sendiri bisa panjang menjelaskan hal tersebut kepada klien saya. Sebabnya, sebagian besar orang memang malas menyiapkan dana menganggur untuk sesuatu yang tidak pasti. Kebanyakan orang bertanya, kenapa masih perlu menyiapkan dana darurat kalau sudah memiliki asuransi.

Hal itu memang tidak seratus persen salah. Namun demikian, pada saat tertentu justru dana darurat adalah sang penyelamat kala asuransi tidak bisa digunakan. Misalnya saja, ada musibah mendadak yang melanda keluarga seperti pencurian barang dagangan di toko. Rata-rata pemilik toko tidak menggunakan asuransi untuk barang dagangannya. Saat itulah ketika uang tersisa jumlahnya terbatas, dana

darurat menjadi penyelamat.

Oleh karena itu, meski terkesan kuno dan berulang-ulang, dana darurat adalah keharusan. Lalu, berapa jumlah dana darurat ideal yang perlu disiapkan? Tidak ada angka dan persentase pasti yang menentukan besarnya dana darurat. Oleh karena itu, sangat mungkin terjadi perbedaan besaran antara dana darurat satu orang dengan orang lainnya. Misalnya, orang yang memiliki profesi berbeda dan *lifestyle* yang berlainan akan memerlukan dana darurat yang berbeda pula. Hal ini menjadi penting sehingga saya selalu melakukan *background check up* untuk mengetahui kebiasaan hidup dari klien.

Namun demikian, cara paling mudah dalam menentukan standar yang baik yang bisa diaplikasikan untuk sebagian besar penduduk adalah enam sampai dengan dua belas kali pengeluaran per bulan. Adapula yang menentukan dana darurat bukan dengan biaya pengeluaran, tetapi dengan gaji bulanan. Sehingga perhitungannya menjadi enam sampai dengan dua belas kali gaji bulanan. Bagi saya, semua itu bukan menjadi masalah besar asalkan dana darurat wajib ada.

Sekarang, yang perlu diperhatikan adalah cara mengumpulkan dana darurat tadi. Mengumpulkan dana darurat tidak perlu *ngoyo* karena tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Karyawan yang gajinya masih kecil dan hanya bisa menyisakan sedikit tidak perlu langsung membagi uang banyak untuk dana darurat. Tentu saja hal ini wajar karena kebutuhan dan

pengeluaran tiap orang juga berbeda.

Yang perlu menjadi perhatian lagi adalah sifat dana darurat harus likuid, yakni mudah dan cepat dicairkan saat kita membutuhkan. Menurut saya, idealnya tingkat kecepatan pencairan dana ini seharusnya di bawah seminggu. Artinya, setiap instrumen keuangan yang dapat dicairkan dalam periode tersebut cocok digunakan sebagai penyimpanan dana darurat.

Hal lain yang perlu mendapat fokus adalah cara menggunakan dana darurat. Uniknya, sudah menjadi hal umum bahwa setiap ada pengeluaran yang harus dilakukan, kita merasa sebagai kondisi darurat. Contohnya, Anda pergi ke supermarket dan tertarik untuk memiliki sebuah sepatu karena edisi yang sangat terbatas. Itu dikenal dengan istilah **fatamorgana darurat**.

Agar aman, Anda dapat menggunakan tiga pertanyaan kunci berikut sebelum mencairkan dana darurat secara tepat. Pertama, apakah biaya tersebut memang tidak diperkirakan sebelumnya? Lalu, apakah biaya tersebut harus segera dibayar? Dan terakhir, apakah biaya tersebut sangat penting dan dapat berpotensi mengganggu kehidupan Anda? Jika jawabannya iya, Anda berhak untuk mencairkan!

Andhika Diskartes,
Perencana Keuangan, founder *diskartes.com*,
dan penulis buku *Investory* dan buku *Investory "X"*.

Mas Praim

"MEMULAI ECO-FRIENDLY"

Cerita : Dimach Putra

Gambar : Bimo Adi





HARI BUAH INTERNASIONAL
1 JULI 2019

Foto: Resha Aditya
Pratama



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA